

# **PERJUANGAN M SYEKH SULAIMAN AR-RASULI DALAM MENGEMBANGKAN PERTI DI MINANGKABAU TAHUN 1930-1970**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)  
Pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam  
Fakultas Ushuludin Dakwah dan Adab  
Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten



Oleh :

**INDAH RUMAEZA**

NIM : 112400282

**FAKULTAS USHULUDDIN DAKWAH DAN ADAB  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
“ SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN  
2016 M/ 1437 H**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat bahwa organisasi Islam merupakan sebagian Agama yang menjadi mayoritas di Indonesia. Hal ini menjadikan Organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik di Indonesia. Dari aspek kesejarahan, dapat ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun organisasi sosial membawa sebuah pembaruan bagi bangsa, seperti kelahiran Serikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik, Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), Serikat Dagang, dan lain-lainnya pada masa prakemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Organisasi keagamaan Islam merupakan kelompok organisasi yang terbesar jumlahnya, baik yang memiliki skala nasional maupun yang bersifat lokal saja. Tidak kurang dari 40 buah organisasi keagamaan Islam yang berskala nasional memiliki cabang-cabang organisasinya di ibukota propinsi maupun ibukota kabupaten /kotamadya, seperti : Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Sarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis Da'wah Islamiyah (MDI), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aisyiah, Muslimat NU, dan sebagainya. Sedangkan organisasi keagamaan Islam yang bersifat lokal pada umumnya bergerak di bidang da'wah dan

---

<sup>1</sup> Tujuh Kuto, *Organisasi Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam Kasus Perti*. <http://tujuhkoto.wordpress.com/2010/06/21/organisasi-sosial-keagamaan-dan-pendidikan-Islam-kasus-perti/>, di akses tanggal 2 Februari 2015

pendidikan seperti: Majelis Ta'lim, Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yatim Piatu, Lembaga-Lembaga Da'wah Lokal, dan sebagainya. Di samping itu, terbentuknya berbagai organisasi ini memberikan akses terhadap kesadaran untuk memperjuangkan nasib sendiri melalui instrumen organisasi yang bersifat nasional. Di Sumatera Barat, terdapat dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kedua organisasi besar ini berasal dari dua kubu yang berbeda: Muhammadiyah mewakili kubu modernis yang berbasis urban/kota, pedagang atau pegawai, sedangkan Persatuan Tarbiyah Islamiyah mewakili kubu tradisionalis berbasis pedesaan, agraris, dan madrasah yang bernama Madrasah Tarbiyah Islamiyah.<sup>2</sup>

Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga tidak bisa dilepaskan dari pusaran politik praktis. Terbentuknya perubahan politik elite-elite Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini tidak terlepas dari aspek kesejarahan organisasi ini, dimana organisasi ini diawal perkembangannya telah menjadi partai politik dengan nama Partai Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah (P.I. PERTI), yang pada tahun 1955 mengikuti pemilu. Namun eksistensi organisasi ini dalam bidang politik hanya bertahan sampai tahun 1970-an selepas kemelut panjang yang menimpa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sehingga organisasi ini mendeklarasikan diri untuk melapaskan baju politiknya dan kembali khitah perjuangan yaitu di bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Pada masa pasca Orde Baru, untuk menjaga independensi organisasi agar tidak berpolitik praktis, maka pada Munas ke IV Tarbiyah tahun 1999 di Hotel Jaya Raya Cisarua Puncak.

Organisasi ini mengambil sebuah keputusan yang penting yaitu “untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai politik apapun”. Dalam hal ini Tarbiyah di deklarasikan sebagai organisasi masa keagamaan yang independen. Walaupun Tarbiyah menyatakan independen dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, tetapi kondisi ini tidak ditunjukkan oleh elite-elite Tarbiyah yang masih terlibat dalam partai politik. Elite-elite Tarbiyah pada pasca Orde Baru

---

<sup>2</sup> Tujuh Kuto, *Organisasi Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam Kasus Perti...*, p. 1.

masih mendapat fasilitas untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Mereka yang terlibat dalam partai politik secara tidak langsung telah menarik masa Tarbiyah untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke Partai Golkar. Di sisi lain elite-elite yang berada di luar partai politik (elite non partisan) seperti akademisi dan birokrat juga memiliki kepentingan untuk menjaga eksistensi organisasi ini agar jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Dengan posisi yang semacam ini, orang akan jadi paham akan apa yang terjadi di kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah setelah berkiprah di dunia politik.<sup>3</sup>

Garapannya yang bercabang dua; pendidikan keagamaan dan politik kenegaraan, adalah lahan yang jelas menuntut dinamisasi dan penalaran intelektual dengan segala macam sistemnya. Artinya, para tokoh Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang memiliki kemampuan intelektual, punya dua wajah fundamental garapan penalarannya. Hanya, karena telah mengambil kata sepakat untuk tidak membicarakan nilai-nilai keagamaan, ibadah dan akidah yang sudah menjadi amalan banyak orang, mereka menjadi segan untuk menggarap lahan itu. Lalu, sebagai manusia, dan apalagi sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi intelektual dan butuh penyalurannya, disengaja atau tidak, potensi nalar itu teralirkan ke potensi kedua, dunia politik dengan segala macam tipu daya. Namun keterlibatan elite-elite Tarbiyah dalam politik, tidak begitu saja mudah diterima oleh elite-elite Tarbiyah lainnya yang berasal dari akademisi. Mereka memandang beragam persoalan keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik lokal di Kota Padang. Pandangan pertama adalah keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik tidak membawa dampak apa-apa terhadap Tarbiyah secara kelembagaan. Mereka yang masuk partai politik hanya membawa misi pribadi tanpa mencoba memberikan sumbangan fikiran dan materi untuk perkembangan lembaga kedepan. Kondisi tersebut

---

<sup>3</sup> Tujuh Kuto, *Organisasi Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam Kasus Perti...*, p. 1.

hanya menyeret Tarbiyah dalam pergolakan politik semata, sehingga inti dari misi lembaga yaitu pendidikan, sosial dan dakwah sering terabaikan.

Minangkabau, disamping salah satu daerah yang mengalami proses Islamisasi sangat dalam, juga merupakan wilayah yang terkenal kuat keterkaitannya pada adapt. Sulit dipastikan kapan sebenarnya Islam masuk ke daerah ini. Ada yang mengatakan abad ke-8, abad ke-12 dan bahkan ada juga yang memperkirakan abad ke-7 karena menurut almanak tiongkok, sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Sumatera Barat pada tahun 674 M.

Terlepas dari berbagai versi yang ada, Hamka mengatakan bahwa raja Islam pertama di Minangkabau (pagaruyung) adalah Raja Alam Arif sekitar tahun 1600 M. Oleh karena pusat kerajaan ini jauh dari daratan, diperkirakan bahwa dengan masuknya raja tersebut, berarti Islam telah menyebar di wilayah Minangkabau sekitar tahun 1600 M tersebut. Sejak Islam masuk ke Minangkabau, telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Pada awal abadke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau yang dipelopori oleh kaum muda. Gerakan itu bertujuan untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sumatera Thawalib yang lebih mengutamakan ilmu-ilmu untuk menggali dan memahami Islam dari Sumbernya.<sup>4</sup>

Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Diantara majalah yang mereka terbitkan termasuk *Suluh Melaju* di Padang (1013), *al-Mizan* di Maninjau (1918) yang diterbitkan oleh organisasi local Sjarikat al-Ihsan, *Al-Mizan*, (lain pula) 1928 dan *Suarti* (Suara Perti) dalam tahun 1940 yang berkenaan dengan soal-soal organisasi. Dalam bidang pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu

---

<sup>4</sup> Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987), p. 111-112

perkumpulan yang bernama Ittihadul sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan PGAI. Diilhami oleh perkembangan tersebut, timbullah niat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk menyetukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, memprakarsai suatu pertemuan besar di Canduang Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1930. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah golongan kaum tua, diantaranya Syekh Abbas al-Qadhi, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya.<sup>5</sup>

Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI. Pada tahun 1930, mengingat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah, timbullah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia mengumpulkan ulama-ulama kaum tua kembali di Candung Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930.

pertemuan ini memutuskan untuk membentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Ketika terbentuknya organisasi ini ada 7 Madrasah Tarbiyah Islamiyah kepunyaan kaum Tua yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1930 PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum, yang oleh karena itu tahun 1930 disebut juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Jumlah ulama yang menggabungkan diri dengan PTI cukup banyak.

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konrensi tanggal 11-16 Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan Tarbiyah

---

<sup>5</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1980), p.241.

Islamiyah berubah menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu:

1. Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu
2. Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan
3. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah
4. Memperkukuh silaturahmi sesama anggota,
5. Memperkukuh dan mempekuat '*adat nan kawī, syara' nan lazim*' dalam setiap negeri.<sup>6</sup>

Diperkirakan pada tahun 1942 sudah terdapat 300 sekolah PERTI dengan 45.000 murid. Sekolah-sekolah tersebut tidak merupakan persatuan yang ketat, diantaranya terdapat perbedaan sifat dan tingkat. Dalam PERTI, termasuk surau kecil maupun surau besar, dimana diajarkan agama pada tingkat tinggi maupun tingkat rendah, semua disebut *Madrasah PERTI*. Akan tetapi dengan memasukkan sistem klasikal, madrasah PERTI ini belum memasukkan perubahan isi pendidikan.

Pada beberapa surau pengajian Alquran atau pengajian kitab kitab yang tradisional hanya diselenggarakan menurut sistem klasikal. Namun pada surau yang lain, dimasukkan juga beberapa mata pelajaran dari sekolah *gubernemen*. Sampai tahun 1947 sekolah PERTI, yang memasukkan mata pelajaran umum belum begitu banyak. organisasi ini juga aktif diluar bidang pendidikan, khususnya membangun sejumlah masjid darumah yatim piatu. Sesudah 1945 PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi). Ketika Belanda mulai mengusik masalah-masalah seperti undang-undang Guru, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Menentang masalah itu Kaum Tua bangkit dan secara berangsur-angsur berpikir kearah politik dan Semenjak tahun 1945, PERTI merupakan

---

<sup>6</sup> Nelmawarni, dkk, "Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)", dalam *Sosiohumanika* 16B (1), (Padang: IAIN-IB Press. 2003), p.52.

partai politik yang merupakan sebagian besar pengaruhnya terbatas di Minangkabau dan beberapa cabang di Sumatera Selatan.

Pada periode-periode berikutnya, terutama pada masa Priode Bung Karno, dalam mengikuti gagasan NASAKOM telah menimbulkan pro dan kontra dalam tubuh PERTI. Kemelut yang kurang terbenahi ini kenyataannya sangat merugikan bagi tujuan semula dari organisasi ini. Pengelolaan bidang pendidikan, dakwah dan sosial seolah-olah terabaikan kalau tidak dapat dikatakan terlupakan sama sekali.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pada tahun 1969 Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pendiri organisasi ini satu-satunya yang masih hidup pada waktu itu, mendekritkan agar kembali kepada *khittah* semula, yaitu status non politik. Dekrit sesepuhnya itu hanya di diterima oleh sebagian saja, yang dipimpin Baharuddin Ar-Rasuli yang kemudian menyalurkan aspirasi politiknya bergabung dengan GOLKAR. Adapun sebagian lagi yang tidak menerima dekrit tersebut tetap sebagai anggota partai politik dan ikut dalam pemilihan umum 1971.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Biografi M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ?
2. Bagaimana Perkembangan PERTI pada masa kepemimpinan M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ?
3. Bagaimana Perjuangan M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam mengembangkan PERTI di Minangkabau ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang :

1. Untuk mengetahui biografi M syekh Sulaiman Ar-Rasuli

---

<sup>7</sup> Karel A. Steenbrik, *Pesantren, sekolah, madrasah*, (Jakarta: LP3ES. 1974), p.64.



2. Untuk mengetahui perkembangan PERTI pada masa kepemimpinan M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau
3. Untuk mengetahui perjuangan M syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.

Hal ini menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik di Indonesia. Dari aspek kesejarahan, dapat ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun organisasi sosial membawa sebuah pembaruan bagi bangsa, seperti kelahiran Serikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik, Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), Serikat Dagang, dan lain-lainnya pada masa prakemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Organisasi keagamaan Islam merupakan kelompok organisasi yang terbesar jumlahnya, baik yang memiliki skala nasional maupun yang bersifat lokal saja. Tidak kurang dari 40 buah organisasi keagamaan Islam yang berskala nasional memiliki cabang-cabang organisasinya di ibukota propinsi maupun ibukota kabupaten/kotamadya, seperti : Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Sarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis Da'wah Islamiyah (MDI), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan

---

<sup>8</sup> Tujuh Kuto, *Organisasi Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam Kasus Perti...*, p. 1.

Muslim se Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aisyiah, Muslimat NU, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Sedangkan organisasi keagamaan Islam yang bersifat lokal pada umumnya bergerak di bidang da'wah dan pendidikan seperti: Majelis Ta'lim, Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yatim Piatu, Lembaga-Lembaga Da'wah Lokal, dan sebagainya. Di samping itu, terbentuknya berbagai organisasi ini memberikan akses terhadap kesadaran untuk memperjuangkan nasib sendiri melalui instrumen organisasi yang bersifat nasional. Di Sumatera Barat, terdapat dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kedua organisasi besar ini berasal dari dua kubu yang berbeda: Muhammadiyah mewakili kubu modernis yang berbasis urban/kota, pedagang atau pegawai, sedangkan Persatuan Tarbiyah Islamiyah mewakili kubu tradisionalis berbasis pedesaan, agraris, dan pesantren.

Terbentuknya organisasi PERTI adalah sebagai penegasan sikap yang berbeda dengan pergerakan kaum pembaru di Minangkabau dan tidak memihak kepada kaum yang mencampuradukan ajaran Islam dengan khurafat, bid'ah, dan takhayul. Dengan demikian PERTI jelas mengambil sikap berpaham Syafi'iah yang tidak berhaluan keras.

Organisasi berperan memberikan perubahan pendidikan dari sistem surau menjadi kelas dan memberikan kemampuan terhadap siswanya membaca kitab-kitab kuning. Alumninya banyak yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi politik dan ada yang mendirikan sekolah-sekolah madrasah dan memberikan bimbingan bimbingan dan pembinaan rohani, terutama bagi orang-orang dewasa seperti mengadakan majelis taklim dan suluk, bekerja sama dengan para sufi, tarekat, dan alim ulama, terutama yang ada di pedesaan. Jadi berdirinya PERTI berdasarkan adanya perubahan mengenai surau yang tradisonal dan berubah menjadi surau klasikal.

---

<sup>9</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006), p. 128- 135.

Surau sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia meskipun di anggap lembaga pendidikan tradisonal, dan ada tiga alasan yang melatarbelakangi perubahan surau. **Pertama**, telah di *mafhum*, keberadaan surau dalam masyarakat surau di Minangkabau sebagai tempat penanaman. Moral, etika, dan belajar baca tulis Al-quran serta tempat pelaksanaan ibadah. Dihubungkan dengan perubahan dan perkembangan zaman dengan segala dampak negatifnya terhadap generasi generasi muda sekarang, yang tidak bisa baca Al-Qu'ran terutama di Minangkabau ada anggapan, bahwa mereka telah meninggalkan pendidikan surau walaupun ada pula suatu apriori dan rasa sinis bahwa sistem pendidikan surau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, keinginan untuk menghidupkan kembali sistem pendidikan surau semakin di harapkan dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, di samping dibutuhkan pemikiran yang konstruktif dan inovatif dalam penataan kelembagaan. **Kedua**, disamping sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan, surau juga mempunyai peran dan fungsi sosiokultural.

Keluarga kaum atau suku yang membangun surau, memanfaatkannya untuk tempat berkumpul, tempat tidur bagi generasi muda, tempat musyawarah, belajar silat dan sebagainya.<sup>10</sup>

**Ketiga** , ketika munculnya perbincangan tentang kelangkaan ulama dan pemikir besar Sumatera Barat yang mempunyai gagasan dan pemikiran tingkat nasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Azyumardi Azra dalam tesisnya, yang berjudul *The rise and decline of the minangkabau: A Traditional Islamic Education in West Sumatera During the Dutch Colonial Government*, meraih gelar M.A. pada Departement of middle Eastern Languages and Cultures, Columbia University, New York, 1988 dinyatakan, bahwa surau merupakan suatu istilah yang luas di gunakan di Asia Tenggara. Sejak waktu yang lama, dalam pengertian yang sama, istilah ini kelihatannya banyak di gunakan di

---

<sup>10</sup> Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam tradisi dan moderenisasi menuju millennium baru*. Jakarta : PT logos 1999, p. 150.

Minangkabau, Sumatera Selatan, semenanjung Malaysia, Sumatera Tengah dan Patani ( Thailand Selatan) sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, mengatakan bahwa secara bahasa “surau” berarti “tempat” atau “tempat penyembahan”. Menurut pengertian asalnya, surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk penyembahan arwah nenek moyang.<sup>11</sup>

Sidi Gazalba menyatakan, bahwa surau merupakan bangunan peninggalan kebudayaan masyarakat setempat sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kaum, suku atau *indu*.<sup>12</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam*, dinyatakan bahwa surau adalah suatu bangunan kecil,tempat sholat yang digunakan juga sebagai tempat mengaji Al-Quran dan belajar dasar-dasar pengetahuan agama bagi anak-anak. Penegrtian surau ini dalam penggunaannya hamper sama dengan istilah langgar atau mushalla. Surau didirikan oleh suatu kaum tertentu sebagai bangunan pelengkap rumah gadang, disini bebrapa keluarga yang sapurik (berasal dari satu perut/keturunan) dibawah pimpinan seorang datuk (penghulu kepala suku) berdiam.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Setelah merumuskan masalah kemudian diadakan penelitian, adapun penelitian yang digunakan untuk pembuatan proposal skripsi ini adalah menggunakan empat metode penelitian yaitu agar dapat mempermudah dalam tiap pembahasan yang akan penulis bahas, empat tahapan tersebut diantaranya, Tahapan Heuristik, Tahapan Interpretasi, tahapan kritik, Tahapan Historiografi. Dari tahapan diatas, penulis akan membahas satu persatu tentang maksud dan tujuannya, dengan memperjelas tahapan yang telah penulis rumuskan diatas.

### **1. Tahapan Heuristik**

Tahapan Heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan data. Heuristik berasal dari bahasa yunani yaitu heuriskan, artinya menemukan, jadi heuristik tiada lain proses

---

<sup>11</sup> Sidi Gazalba. *Masjid pusat ibadat dan kebudayaan Islam*. (Jakarta : pustaka antara 1983), p. 291.

<sup>12</sup> Kafrawi Ridwan. *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV Jakarta : ichtiar baru van hoeve 1994, p. 318.

mencari sumber dan jejak-jejak peristiwa sejarah. Dalam tahapan ini, penulis mengadakan studi kepustakaan di beberapa perpustakaan pribadi maupun perpustakaan umum. Perpustakaan pribadi yang penulis kunjungi adalah dari beberapa rekan mahasiswa, adapun perpustakaan umum yang penulis kunjungi adalah perpustakaan IAIN “SMH” Banten, perpustakaan daerah Serang ( PUSDA ), perpustakaan Nasional, dan kunjungan ke berbagai perpustakaan lainnya. Penulis berhasil mengumpulkan beberapa jilid buku, yang menunjang pada masalah yang akan diteliti, dan dari sekian banyak judul buku, yang menjadi sumber primer adalah: karangan Alaidin Koto yang berjudul Persatuan Tarbiyah Islamiyah karangan Deliar Noer yang berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia, Alaidin Koto yang berjudul sejarah perjuangan persatuan tarbiyah Islamiyah dipentas nasional dan sumber sekunder adalah Naskah tentang Biografi tentang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang telah disadur oleh Syaifullah Amin dan Darul Makmur Naskah tentang Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli.<sup>13</sup>

## **2. Tahapan Kritik**

Mengenai tahapan kritik penulis menyimpulkan bahwa judul yang penulis bahas yang berjudul Perjuangan M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Dalam Memperjuangkan Perti Di Minangkabau Tahun 1930-1970 sangatlah menarik untuk dibahas karena tentang mengenai perubahan surau yang bersistem Halaqah menjadi sistem kelas untuk belajar dan Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang memperjuangkannya hingga akhirnya beliau mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau yang dikenal (PERTI) . memang tidaklah mudah dalam mendirikan sebuah organisasi, perlu adanya kerja keras dan semangat yang gigih untuk mencapainya, dan adanya perjuangan yang tidak lah mudah, Syekh Sulaiamn Ar-Rasuli berhasil mendirikan

---

<sup>13</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta 55282- Indonesia), p. 91-108.

sebuah organisasi yang menjadikan surau di Minangkabau menjadi lebih berkembang menjadi lebih baik.

### **3. Tahapan interpretasi**

Tahapan interpretasi adalah kegiatan menafsirkan data untuk memberikan makna dan pengertian serta menghidupkan kembali (reliving) proses sejarah. Dalam tahapan ini. Dan dalam tahapan ini penulis menafsirkan data dengan memperoleh sumber-sumber tertulis yakni berupa Naskah mengenai tentang Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang disadur kembali oleh Syaifullah Amin, Darul Makmur Naskah tentang Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli dan buku-buku pendukung lainnya untuk membahas judul Perjuangan M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Dalam Memperjuangkan Perti Di Minangkabau Tahun 1930-1970.<sup>14</sup>

### **4. Tahapan Historiografi**

Tahapan historiografi adalah penulis, dan ketika penulis memilih judul tentang Perjuangan M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Dalam Memperjuangkan Perti Di Minangkabau Tahun 1930-1970 di karenakan ada hal yang menarik untuk di bahas yakni mengenai tentang sebelum berdirinya Perti yaitu membahas tentang lembaga pendidikan Islam sebelum tahun 1900-an masih sistem surau dengan tidak berkelas-kelas dan tidak memakai bangku, hanya duduk bersela saja. Begitulah sistem surau-surau ditempat belajar yang diselenggarakan oleh putra-putra Minangkabau sebelum tahun 1900-an, keadaan ini mungkin dipengaruhi sistem belajar mereka waktu di Masjid al-Haram Mekkah dahulu. Dan ketika tahun 1909-1930 sistem surau berubah menjadi kelas. Dan yang menjadi Guru di Surau yaitu sosok ulama yang berasal dari Canduang Bukittinggi yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dan beliau yang merubah Surau yang pada awal mulanya bersistem Halaqah menjadi Surau baru yang

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p. 91-108.

menjadi kan kelas untuk belajar. Maka dari itu penulis menarik untuk membahas judul tersebut untuk menjadi tulisan karya ilmiah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui garis besarnya yang akan dibahas, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam bab per bab yaitu sebagai berikut.

Bab I : pendahuluan, Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah penelitian, Sistematika Pembahasan

Bab II : Biografi meliputi riwayat hidup, pendidikan , dan karya

Bab III : sejarah PERTI di Minangkabau pada masa kepemimpinan Syekh M Sulaiman ar-Rasuli meliputi: asal usul lahirnya PERTI di Minangkabau, dinamika perkembangan PERTI di Minangkabau, dan kontribusi PERTI di Minangkabau

BAB IV : Perkembangan PERTI pada masa kepemimpinan Syekh M Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau meliputi: keadaan Minangkabau pada masa kepemimpinan Syekh M Sulaiman Ar-Rasuli, Kondisi PERTI pada masa kepemimpinan Syekh M Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau, Pengaruh Syekh M Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau terhadap PERTI

BAB V : Penutup





Selesai belajar di Aceh ia kembali ke desanya. Kemudian, ia mendirikan surau di Ulakan dan mempunyai pengaruh yang besar di daerah ini sehingga ia mendapat gelar Tuanku dari Ulakan, pengaruh Syekh Burhanuddin masih tersa kuat sampai sekarang, ribuan umat Islam dari seluruh pelosok Sumatera Barat mengunjungi makamnya untuk mengadakan acara *basafa* (bersafar), semacam tirakatan untuk mengenang jasa-jasa Beliau. Surau Ulakan termasyhur sebagai satu-satunya pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Surau Ulakan menarik banyak murid dari seluruh wilayah di Minangkabau. Mereka mengambil keahlian dalam berbagai cabang disiplin Islam. Surau Ulakan berhasil melahirkan empat Ulama Besar dari berbagai daerah Agam. Mereka dikenal dengan Urang Ampek Angkek. Setelah mereka menamatkan pendidikannya di Surau Syekh Burahnuddin, mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan mendirikan Surau.<sup>16</sup>

Cepatnya penyebaran Islam di Minangkabau, menurut Christine Dobbin, berkaitan erat dengan organisasi persaudaran sufi atau tareqat. Para Ulama tasawuf yang datang ke Minangkabau, dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam, mendirikan organisasi tareqat. Pada abad ke-18, di Minangkabau terdapat tiga aliran tareqat, yaitu Naqsabandiyah, Syattariyah, dan Qadariyyah. Adapun pengertian tareqat Naqsabandiyah merupakan tareqat yang dibawakan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al- Awisi Al-Bukhari, dan tareqat Syattariyah merupakan tareqat yang dibawakan oleh Abdullah Syathar yang berkembang luas di Mekah, dan tareqat Qadariyyah merupakan tareqat yang dibawakan oleh Syekh Abdul qadir Jailani. Tareqat yang pertama kali masuk ke Minangkabau adalah Naqasabadiyah pada abad ke-17. Berikutnya, tareqat Syattariyyah dibawa oleh Syekh Burhanuddin pada akhir abad ke-17. Sedangkan tareqat Qadariyyah memasuki Minangkabau pada akhir abad ke-18.

---

<sup>16</sup> Soekama Karya, *Ensiklopedi Mini Sejarah Kebudayaan Islam...*, p. 184-189 .

Semua tareqat tersebut mengembangkan organisasi tareqat dengan mendirikan Surau. Maka dari itu, Surau di samping sebagai Lembaga Pendidikan juga sebagai kegiatan tareqat.<sup>17</sup>

Pengajian di Surau-Surau lebih banyak di tekankan pada perkembangan jiwa manusia dari pada prilaku dan ditekankan pada perkembangan spiritual dari pada tuntunan etika masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang tidak mengenal dan menerapkan syari'ah Islam walaupun ajaran-ajaran Islam banyak dipraktikkan di Surau-Surau. Kepercayaan-kepercayaan pra-Islam masih dijalankan oleh umat Islam. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam merajalela, misalnya mencuri, menyabubg, judi, merampok, dan menjual anak perempuan dan isteri demi kebutuhan ekonomi. Selain itu, kondisi sosial ekonomi juga turut berperan terhadap praktek-praktek yang bertentangan dengan Islam. Pada akhir abad ke-18 di beberapa daerah, seperti di Kota Tua, mengalami kemajuan perdagangan aksia dan hasil pertanian. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, muncul permasalahan moral yang menuntut perhatian besar para tokoh-tokoh agama. Hubungan dagang dengan dunia luar yang tidak merata di beberapa wilayah memicu perselisihan, perampokan yang menjadi pekerjaan turun temurun semakin menyulitkan. Mereka menghadang pedagang dan merampoknya bahkan menculik mereka lalu menjualnya kepada pedagang-pedagang di Pantai Timur. Oleh karena itu, pada akhir abad ke-18 munculah gerakan kebangkitan Islam. Pengajaran hukum Islam di tingkatkan di sekolah-sekolah Muslim. Slogan "kembali ke Syari'ah" mereka kumandangkan. Selain meningkatkan pengajaran hukum Islam di Sekolah-Sekolah Muslim, Ulama-Ulama juga mengajak masyarakat menjalankan Syari'at Islam. Mislanya, Tuanku Nan Tua, salah seorang murid terkemuka Syekh Burhanuddin mencoba membujuk penduduk desa-desa yang terdekat dan meyakinkan mereka agar mau menereima lima pokok Islam dan hidup sebagai Muslim yang baik. Untuk itu, Tuanku Nan Tua mengutus rombongan murid, terutama ke desa-desa

---

<sup>17</sup> Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Ciputat: Qamtum Teaching, 2006), p. 70.

perampok yang membutuhkan perbaikan. Rupanya taktik yang dilakukan Tuanku Nan Tua ini berhasil sampai pada pertengahan 1790-an daerah Empat Angkat mengalami kemajuan. Kebangkitan agama yang dimulai akhir abad ke-18 ini terus berlanjut, yang mencapai kelimaknya pada awal abad ke-19.

Pada akhir 1803 atau awal 1804, pulanglah orang Jama'ah Haji dari Tanah suci Mekkah. Mereka adalah Haji Sumanik, Haji Miskin dan Haji Piobang. Ketika mereka menjalankan Ibadah Haji, mereka telah menyaksikan serangan orang-orang Wahabi ke Mekkah, atau paling tidak mereka telah mendengarkan ajaran-ajaran Wahabi yang akhirnya mempengaruhi mereka. Setelah mereka pulang ke Minangkabau, mereka membawa semangat baru dan kemudian mereka membandingkan kondisi masyarakat Minangkabau dengan ajaran-ajaran wahabi. Mereka melihat perlu diadakan pembaruan tatanan sosial. Tujuan utama mereka adalah membersihkan masyarakat dari adat buruk yang menyimpang dari Islam. Menurut mereka, pembaruan sosial harus dilakukan dengan meyebarakan ajaran Wahabi yang puritan dan menerapkannya dengan keras. Pada awalnya mereka mendapat perlawanan dari masyarakat. Namun, lama kelamaan banyak tokoh agama yang tertarik dan mendukung mereka. Tuanku Nan Receh, murid kesayangan Tuanku Nan Tua yang tidak setuju dengan militansi mereka, bergabung dengan Haji Miskin.

Dari sinilah mulai terbentuknya gerakan Padri. Tuanku Nan renech kemudian mendapat dukungan dari tujuh *Tuanku*, sebutan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan agama secara mendalam di Agam Sumatera Barat. Karena kekerasan mereka, mereka dikenal dengan *Harimau Nan Delapan*. Dalam menjalankan dakwahnya, orang-orang padre tereknal dengan cara-cara kekerasannya, mereka saling menyerang desa-desa bahkan mereka tak segan-segan membakar desa yang mereka serang. Mereka sangat menolak tasawuf, yaitu usaha mendekati Tuhan secara mistik. Mereka mengutuk dan sekaligus membasmi praktek-praktek bid'ah dan Khurafat. Mereka membakar pusat-pusat tareqat dan membunuh Ulama-

Ulama yang tidak bersedia menerima ajaran Wahabi. Kekerasan Gerakan Padri menimbulkan konflik dan ketegangan di masyarakat Minangkabau sehingga menyebabkan Perang Padri. Ketegangan tersebut kemudian mengundang campur tangan Belanda yang berlanjut dengan penjajahan atas Minangkabau.<sup>18</sup>

Dan ketika Minangkabau masih dalam sistem pengajian halaqah dalam Surau. Pembahasan mengenai Surau sebagai lembaga pendidikan Islam di Minangkabau menjadi suatu pembaruan bagi Minangkabau. Istilah Surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil baligh dan orang tua yang uzur. Fungsi surau ini semakin kuat posisinya karena struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, menurut ketentuan adat bahwa laki-laki tak punya kamar di rumah orang tua mereka, sehingga mereka diharuskan tidur di surau. Kenyataan ini menyebabkan surau menjadi tempat amat penting bagi pendewasaan generasi Minangkabau, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan praktis lainnya. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman, pada masa ini, eksistensi surau di samping tempat sholat juga digunakan Syekh Burhanuddin sebagai tempat menyebarkan ajaran Islam, khususnya tareqat (suluk).<sup>19</sup>

Melalui pendekatan ajaran tareqat (suluk) syattariyah, Syekh Burhabuddin menamakan ajaran Islam kepada masyarakat Minangkabau. Dengan ajarannya yang menekankan kesederhanaan, tareqat syattariyah berkembang dengan pesat. Muridnya tidak hanya berasal dari Ulakan Pariaman saja melainkan juga berasal dari daerah-daerah lain di Minangkabau, seperti Tuanku Mansiang Nan Tuo yang mendirikan surau Paninjauan dan

---

<sup>18</sup> Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam...*, p. 70.

<sup>19</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Millenium Baru*, (Ciputat: Logos 1999), p. 130.

Tuanku Nan Kaciak yang mendirikan surau di Koto Gadang. Sehingga pada akhirnya, murid-murid Syekh Burhanuddin tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan surau sebagai lembaga pendidikan bagi generasi selanjutnya.

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqah, materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih di seputar belajar huruf Hijaiyah dan membaca al-quran, disamping ilmu-ilmu keIslaman lainnya, seperti keimanan, akhlak dan ibadah. Pada umumnya pendidikan ini dilaksanakan pada malam hari.

Secara bertahap, eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami kemajuan. Ada dua jenjang pendidikan surau pada era ini, yaitu :

a. Pengajaran al-quran. Untuk mempelajari Al-Quran ada dua macam tingkatan, yakni:

1. Pendidikan rendah

Untuk memahami ejaan huruf Al-quran dan membaca Al-Quran. Di samping itu, juga dipelajari cara berwudhu dan tata cara sholat yang dilakukan dengan metode praktik dan menghafal, keimanan terutama yang berhubungan dengan sifat dua puluh yang dieplajari dengan menggunakan metode menghafal melalui lagu, dan akhlak yang dilakukan dengan cerita Nabi dan orang-orang shalih lainnya.

2. Pendidikan atas

Pendidikan membaca Al-Quran dengan lagu, kasidah, barzanji, tajwid dan kitab parukunan. Lama pendidikan di kedua jenis pendidikan tersebut tidak ditentukan. Seorang siswa baru dikatakan tamat bila ia telah mampu menguasai materi-materi di atas dengan baik. Bahkan ada kalanya seorang siswa yang telah menamatkan mempelajari Al\_Quran dua atau tiga kali baru berehenti dari pengajaran al-quran.

b. Pengajian Kitab

Materi pendidikan pada jenjang ini meliputi: ilmu Sharaf dan nahwu, ilmu Fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Cara mengajarkannya adalah dengan membaca sebuah kitab

Arab dan kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Setelah itu baru diterangkan maksudnya. Penekanan pada jenjang ini adalah pada aspek hafalan. Agar siswa cepat hafal, maka metode pengajarannya dilakukan melalui cara melafalkan materi dengan lagu-lagu tertentu. Pelaksanaan pendidikan pada jenjang ini biasanya dilakukan pada siang maupun malam hari.<sup>20</sup>

Pada masa awal, kitab yang dipelajari pada masing-masing materi pendidikan masih mengacu pada satu kitab tertentu. Setelah Ulama Minangkabau yang belajar di Timur Tengah kembali ke tanah air, sumber yang digunakan mulai mengalami pergeseran. Kitab yang digunakan pada setiap materi pendidikan sudah bermacam-macam. Terjadinya pencerahan semacam ini disebabkan karena Ulama-Ulama yang pulang tersebut tidak dengan tangan hampa melainkan juga dengan membawa sumber-sumber (kitab) yang banyak sekali. Metode pendidikan yang digunakan di surau bila dibandingkan dengan metode pendidikan modern, sesungguhnya metode pendidikan surau memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya terletak pada kemampuan menghafal muatan teoretis keilmuan. Sedangkan kelemahannya terdapat pada lemahnya kemampuan memahami dan menganalisis teks. Di sisi lain, metode pendidikan ini diterapkan secara keliru. Siswa banyak yang bisa membaca dan menghafal isi suatu kitab, akan tetapi tidak bisa menulis apa yang di baca dan dihafalnya itu.<sup>21</sup>

Surau tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam tetapi juga sebagai lembaga pendidikan tarekat. Fungsi surau yang kedua ini lebih dominan dalam perkembangannya di Minangkabau. Setiap Surau di Minangkabau memiliki otoritasnya sendiri, baik dalam praktek tarekat yang dikembangkan oleh masing-masing surau tersebut lebih banyak muatan mistinya ketimbang syari'at. Gejala ini dapat di ketahui, meskipun Islam sudah dianut masyarakat tetapi praktik-praktik yang bertentangan dengan syari'at

---

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Millenium Baru ...*, p. 73-74.

<sup>21</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Millenium Baru ...*, p. 133.

masih dilakukan terutama para penguasa (kaum adat). Melihat kondisi masyarakat yang demikian, maka Syekh Abdurahman, salah seorang Ulama dari Batu Hampar, berupaya menyadarkan umat dengan pendekatan persuasive dan ia pun berhasil. Keberhasilannya ini tidak serta merta menghilangkan praktik bid'ah dan khurafat di sebagian daerah lain. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai ajaran agama Islam, maka Syekh Abdurahman mendirikan surau yang terkenal dengan "surau Dagang". Di surau inilah Syekh Abdurahman mengajarkan Al-Quran dengan berbagai macam irama dan ilmu-ilmu keIslaman lainnya. Keadaan yang demikian itu membuat suasana semakin memanas dan membagi masyarakat dalam dua kubu. Kubu pertama yang menolak pembaruan yang dimotori oleh kaum adat yang dibantu Kolonial Belanda, dan kubu yang kedua diwakili oleh pemuka agama (kaum Padri) yang sudah gerah melihat praktik kehidupan yang sudah jauh dari nilai-nilai agama. Dengan momentum kepulangan "tiga serangkai" H.miskin dari Pandai Sikek, H.piobang dari Agam dan H.Sumanik dari Batusangkar dari Mekkah, maka dilakukan pembaruan tetapi dengan pendekatan yang keras dan radikal. Ulama-ulama ini juga dibantu oleh Ulama-Ulama yang lain seperti Tuanku Nan renech dan tuanku di Agam yang bergelar "Harimau Nan Salapan". Usaha yang dilakuka Kaum Padri, sekurang-kurangnya telah berhasil membangkitkan semangat nasionalisme umat Islam dalam menentang penjajah. Meskipun pada akhirnya gerakan ini gagal membumikan ide pembaruannya. Surau sebagai lembaga pendidikan Islam mulai surut peranannya karena disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, selama Perang Padri banyak surau yang musnah terbakar dan Syekh banyak yang meninggal, *kedua*, Belanda mulai memperkenalkan sekolah Nagari, *ketiga*, kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan madrasah sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap praktik-praktik surau yang penuh dengan khurafat, bid'ah dan takhayul.

Ekspansi yang dilakukan kaum intelektual muda dengan mendirikan madrasah telah mengancam keberadaan surau sebagai lembaga pendidikan Islam. Untuk menjaga

eksistensinya, Ulama tradisional mengadakan rapat besar yang diselenggarakan di Bukittinggi tanggal 5 Mei 1930 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Keputusan lain dari rapat itu adalah bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tergabung ke dalam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) harus di modernisasi mengikuti pola yang dikembangkan Kaum Intelektual Muda. Dengan demikian, Ulama tradisional tidak punya alternatif untuk menyelamatkan sistem pendidikan surau kecuali mengubahnya seperti yang dilakukan oleh Kaum Intelektual Muda. Dalam posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam, posisi surau sangat strategis baik dalam proses pengembangan Islam maupun pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam bahkan surau telah mampu mencetak para Ulama besar Minangkabau dan menumbuhkan semangat nasionalisme, terutama dalam mengusir kolonialisme Belanda. Di antara para alumni pendidikan surau ini adalah Haji Rasul, AR. At Mansur, Abdullah Ahmad dan Hamka. Akan tetapi perkembangan agama Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kiprah para tokoh dan ulama besar yang giat menyebarkan ajarannya di berbagai wilayah.<sup>22</sup>

Salah satu daerah yang melahirkan banyak ulama terkemuka. Diantara ulama terkemuka tersebut adalah Syekh Sulaiman ar-Rasuli. Syekh Sulaiman ar-Rasuli, lahir di Canduang, sekitar 10 km sebelah timur Bukittinggi, Sumatera Barat, 1230 H/1 Agustus 1970 M. ia adalah seorang tokoh ulama dari golongan Kaum tua yang gigih mempertahankan madzhab Syafi'i tak jarang pula, beliau dipanggil dengan sebutan "Inyiak Canduang". Ayahnya, Angku Mudo Muhammad Rasul, adalah seorang ulama yang disegani di kampung halamannya. Syekh Sulaiman ar-Rasuli, yang lebih dikenal oleh para muridnya dengan nama Maulana Syekh Sulaiman, sejak kecil memperoleh pendidikan awal, terutama dalam bidang pelajaran agama dari ayahnya. Sebelum meneruskan studinya ke Mekkah, Syekh Sulaiman ar-Rasuli pernah belajar kepada Syekh Yahya Al-Khalidi Magak, Bukittinggi Sumatera Barat.

---

<sup>22</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Millenium Baru...*, p. 146.



Pada masa itu masyarakat menggunakan sistem pengajian surau dalam bentuk halaqah sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan.

## **B. Pendidikan M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli**

Pendidikan terakhir Syekh sulaiman ar-Rasuli adalah di Mekkah. Ulama yang seangkatan dengannya antara lain adalah Kyai Haji Hasyim Asyari dari Jawa Timur (1287 H/1871M- 1366 H/1967 M), Syekh Hasan Maksud Sumatera Utara (wafat 1355 H/1936 M), Syekh Khatib al-Minangkabawi, syekh Muhammad Zain Simabur Al-Minangkabawi sempat menjadi Mufti kerajaan Perak tahun 1955 dan wafat di Pariaman pada 1957), Syekh Muhammad Jamil Jaho Al-Minangkabawi, Syekh Abbas Ladang Lawas Al-Minangkabawi dll. Sementara ulama Malaysia yang seangkatan dan sama-sama belajar di Mekkah dengannya antara lain adalah Syekh Utsman Sarawak (1281 H/ 1864 M – 1339 h/1921 M), Tok Kanali (1287 H/1871 M- 1352 H/1933 M) dll. Ketika tinggal di Mekkah, Syekh Sulaiman ar-Rasuli selain belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Abdul Lathif al-Minangkabawi, beliau juga mendalami ilmu-ilmu daripada ulama Kelantan dari Pattani. Guru-gurunya ketika di Mekkah antara lain adalah, Syekh Wan Ali Abdur Rahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fathani dan Syekh Ahmad Muhammad Zain al-Fathani, Syekh Ali Kutan Al-Kalantani, dan beberapa ulama Melayu yang bermukim disana. Dan sebaliknya di Mekkah, Syekh sulaiman ar-Rasuli mendirikan Pondok Pesantren di tanah kelahirannya di Bukittinggi, Sumatera. Beliau berusaha untuk mempertahankan pengajaran menurut sistem pondok. Namun pada akhirnya, pengajian sistem pondok secara halaqah dengan bersila di lantai dalam pendidikan Syekh Sulaiman ar-Rasuli mulai di kombinasikan menjadi sistem persekolahan, duduk di bangku pada 1930, namun kitab-kitab yang di ajarkan

tidak pernah diubah. Bahkan sistem halaqah ala pondok pesantren juga tetap dilaksanakan hingga saat ini.<sup>23</sup>

Dalam waktu singkat, pesantren yang didirikannya mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitarnya. Dukungan ini mendorong bertambahnya jumlah murid yang menuntut ilmu di pesantren. Murid-murid yang belajar di pesantren tersebut tidak hanya berasal dan dari berbagai wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Tapanuli, Aceh, dan bahkan, ada yang datang dari Malaysia. Materi utama pendidikan di madrasah yang bernama Madrasah Tarbiyah Islamiyah tersebut adalah pengajaran paham Ahlussunnah Waljamaah dan madzhab Syafi'i. Syekh Sulaiman ar-Rusuli sangat konsisten menjalankan paham dan madzhab ini. Pada tahun 1930 itu juga, Syekh Sulaiman ar-Rasuli bersama sahabat-sahabatnya Syekh Abbas Ladang Lawas dan Syekh Muhammad Jamil Jaho menggagas mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Baik dalam system pendidikan maupun perjuangannya, Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan kawan-kawannya secara tegas dan berani mempertahankan dan berpegang dengan satu madzhab, yakni madzhab Syafi'i. selain aktif di dunia pendidikan agama, Syekh sulaiman ar-rasuli juga aktif di dunia politik dan keorganisasian. Sejak 1921, ia bersama dua teman akrabnya, Syekh abbas dan syekh Muhammad jamil, serta sejumlah ulama "Kaum Tua" (golongan ulama yang tetap mengikuti salah satu dari empat madzhab dalam Fiqh : Maliki, Syafi'I, Hanafi dan Hambali) Minangkabau membentuk organisasi bernama Ittihadul Ulama Sumatera ( Persatuan Ulama Sumatera) yang bertujuan untuk membela dan mengembangkan paham Ahl al-Sunnah wal al-Jama'ah madzhab Syafi'i. Salah satu kegiatannya adalah menerbitkan majalah al-Radd wa al-Mardud sebagai sarana untuk menjelaskan serta mempertahankan paham Ahl al-Sunnah wal al-Jama'ah madzhab Syafi'i. Sedangkan para Ulama Malaysia yang seangkatan dengan

---

<sup>23</sup> Amin Syaifullah, *Naskah Syekh Sulaiman ar-Rasuli al-Minangkabawi, telah disadur kembali*

Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan sama-sama belajar di Mekkah adalah Syekh Utsman Sarawak (1981 H/1864 M – 1339 H/ 1921 M) dan Tok Kenali (1287 H/ 1871 M – 1352 H/ 1933 M).

Dalam penentuan awal dan akhir puasa (Ramadhan), Syekh Sulaiman ar-Rasuli lebih menyetujui metode rukyah (melihat langsung bulan sabit). Ini merupakan sebetuk penegasan beliau untuk mempertahankan corak keIslaman yang berakar pada tradisi Nusantara. Dalam banyak hal Syekh Sulaiman ar-Rasuli beserta seluruh Ulama Tarbiyah Islamiyah mempertahankan cirri-ciri dan cita-cita keIslaman tradisonal menurut manhaj Ahl al-Sunnah wal al-Jama'ah bersama-sama dengan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan semua ulama di seluruh dunia Islam yang masih tetap berpegang teguh kepada madzhab Syafi'i. Menurut Hamka, Syekh Sulaiman ar-Rasuli merupakan seorang ulama yang sangat gigih memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mendidik bangsanya menjadi lebih maju dan berusaha melepaskan diri dari penjajahan. Hamka melansir dalam bukunya yang berjudul Ayahku Menulis, "Cuma Beliau (maksudnya Dr. Haji Abdul Karim Amrullah) berselisih dalam satu perkara (dengan Syekh Sulaiman ar-Rasuli). Bahwa Syekh Sulaiman ar-Rasuli mempertahankan Thariqat Naqsyabandiyah karena Tareqat tersebut yang digunakan oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli, dan salah seorang di antara Syekh nya (mungkin maksudnya Syekh Saad Mungka, musuh polemik Syekh Ahmad Khatib Minangkabau). Sedangkan pihak Dr. Haji Abdul Karim amrullah dan Syekh Jambek tidak suka kepada thareqat itu.

### **C. Karya M Syekh Sulaiman Ar-Rasuli**

Sebagai seorang ulama, syekh sulaiman ar-Rasuli telah melahirkan bebrapa karya. Dan karya-karya ini banyak di pelajari oleh para pelajar Muslim di Minangkabau Sumatera, dan bebrapa kawasan Nusantara lainnya. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

1. Dhiyaus Siraj Fil Isra'Walmi'raj

2. Tsamaratul Ihsan fi wiladah Sayyidil Insan (membahas tentang Tareqat Naqsabandiyah berbentuk bingkai cerita dan bentuk Nazham atau syair)
3. Dawaul Qulub fi Qishshah Yusuf wa Ya'qub
4. Risalah al-Aqwal al-Washitah fi Dzikri Warrabithah
5. Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril quran (membahas tentang di Juz terakhir dari Al-Quran dan diterbitkan oleh Mathba'ah Al-Islamiyah Bukittinggi pada tahun 1929)
6. Al-Jawahirul Kalamiyyah (membahas tentang ilmu Tauhid dasar)
7. Sabilus Salamah fi wurd Sayyidil Ummah
8. Perdamaian Adat dan syara (membahas Perdamaian Adat dan Syara' Minangkabau)
9. Kisah Muhammad Arif (membahas tentang Tasawuf).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Amin Syaifullah, *Naskah Syekh Sulaiman ar-Rasuli al-Minangkabawi, telah disadur kembali.*

### **BAB III**

## **SEJARAH PERTI DI MINANGKABAU PADA MASA KEPEMIMPINAN SYEKH M SULAIMAN AR-RASULI**

### **A. Asal Usul Lahirnya PERTI di Minangkabau**

Menurut pendapat setengah ahli kerajaan Islam berdiri di Minangkabau pada Tahun 1500 M atau tahun 1650 M. ini berarti bahwa agama Islam baru masuk ke Minangkabau pada Tahun 1500 M itu, melainkan kerajaan Islam lah yang baru berdiri. Sesungguhnya agama Islam telah masuk ke Minangkabau sebelum tahun 1500 M. sebagaimana telah diketahui, bahwa orang-orang Minangkabau suka merantau dan banyak mengadakan perhubungan dengan Malaka. Mereka itu pergi merantau menghiliri sungai Kampar dan Sungai Siak, lalu berlayar ke Malaka.<sup>25</sup>

Dalam abad ke-15 Malaka sangat maju dan Agama Islam telah mulai berkembang disana dengan amat pesatnyanya. Sebab itu banyaklah orang-orang Minangkabau pergi merantau kesana, lalu mereka memeluk agama Islam. Sebagian mereka itu menetap dan membuka negeri di negeri Sembilan. Sebagian mereka pulang ke Minangkabau, lalu dibawanya agama Islam ke negerinya. Selain dari pada itu orang-orang Minangkabau dari pesisir Barat banyak pula berlayar ke sebelah Utara, ke Natal, Singkil, Tapaktuan dan sampai ke Aceh. Dalam akhir abad ke 12 agama Islam telah masuk ke tanah Aceh. Sebab itu orang Minangkabau

---

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta 1957), p. 21-22.

yang merantau disana, lalu memeluk agama Islam pula. Kemudian agama Islam itu dibawanya ke Minangkabau. Pada abad ke 15 orang-orang Aceh menduduki pesisir Barat, lalu di ajarkannya pula agama Islam di sana. Oleh karena pengajaran agama Islam itu amat baik, maka banyaklah orang Minangkabau mempelajari agama itu. Kemudian orang-orang dari pesisir barat banyak yang pergi belajar ilmu agama Islam ke tanah Aceh. Mereka yang pulang dari tanah Aceh berusaha mengembangkan pengajaran Islam di negrinya masing-masing. Pada mula-mulanya banyak penghulu-penghulu dan orang-orang yang beradat tidak menyukainya. Akan tetapi dengan kesabaran hati dan kemauan yang keras alim Ulama itu melaksanakan kewajibannya dengan cara kebijaksanaan. Akhirnya usahanya itu makin lama makin maju, sehingga berduyun-duyunlah orang Minangkabau memeluk agama Islam.<sup>26</sup>

Minangkabau sering di identikkan dengan Sumatera Barat. Sebenarnya perkembangan sejarah Minangkabau menunjukkan bahwa daerah geografis Minangkabau tidak sama dengan daerah geografis Sumatera Barat sekarang. Wilayah minangkabau yang disebut dengan Alam Minangkabau sebenarnya lebih luas daripada Sumatera barat, sebab Alam Minangkabau di artikan jauh lebih luas daripada batas-batas Sumatera Barat. Secara tradisinya kawasan-kawasan yang terletak dibawah pengaruh Minangkabau disebut Alam Minangkabau. Oleh karena itu Minangkabau terdiri daripada kesatuan geografis, politik, ekonomi, dan kebudayaan lazim disebut *darek*, *pesisir* dan *rantau*.

Orang Minangkabau merupakan salah satu daripada etnik melayu Indonesia yang mempunyai intensiti yang kuat terhadap merantau. Jika dilihat dari berdasarkan volksteling 1930, suku minangkabau mempunyai intensiti merantau terbesar keempat, sesudah Bawean, Batak, dan Banjar. Merantau juga bukanlah semata-mata satu akibat proses pembandaran yang baru berlaku dalam masyarakat minangkabau , dan semakin bertambah dalam sejarah mereka, sehingga banyak mitos dan legenda tempat yang menceritakan peneroka-peneroka

---

<sup>26</sup> Rahilah Omar dan Nelmawarni, *Negri Sembilan: Rantau Minangkabau di Semenanjung Tanah Melayu*, (Jurnal pendiidkan Sejarah IX, Malaysia 2008), p. 2-4.

Minangkabau pada zaman lampau ditemui beberapa tempat tidak sahaja di Sumatera, bahkan juga diluar pulau Sumatera. Misalnya di Sumatera tempat penempatan adalah seperti di tapak tuan di meulaboh di Aceh Barat, di Siak Sri Indrapura dan di Muara Takus.

Selain di Minangkabau memiliki tempat-tempat yang mempunyai nilai mitos yang sangat kuat akan tetapi Minangkabau tidak terlepas dari berbagai aspek-aspek penting lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan agama. Seperti kita ketahui Salah satu organisasi keagamaan berskala nasional yang lahir di Sumatera Barat pada awal abad 20 adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Organisasi di bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam ini muncul di latar belakang oleh perkembangan paham keagamaan yang digerakkan oleh kaum muda untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda ini melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan-perdebatan. Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda ini, kaum tua pun mulai bergerak. Mereka juga menerbitkan majalah untuk menandingi majalah-majalah yang di terbitkan kaum muda. Dalam lapangan pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau, seperti surau syekh khatib Muhammad Ali di Parak Gadang, Surau Syekh Sulaiman ar-Rasuli di Candung, Bukittinggi dll. Selain itu kaum tua juga membentuk perkumpulan yang bernama ittihad Ulama yang kemudian berganti nama dengan Persatuan tarbiyah Islamiyah.<sup>27</sup>

Selain PERTI terjun di bidang kemasyarakatan dalam sejarahnya PERTI juga sempat menjadi salah satu organisasi politik Praktis, yaitu pada tahun 1945 yang kemudian mengikuti pemilu pada tahun 1955 bahkan pernah bergabung juga dengan GOLKAR serta PPP sebelum akhirnya menyatakan sebagai organisasi yang konsen hanya dalam bidang kemasyarakatan dan tidak terikat dengan organisasi politik manapun.

Lembaga ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1928 M (15 Zulkaedah 1346 H). oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli (Inyiak Canduang) di Candung Baso Bukittinggi sebagai lembaga

---

<sup>27</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), p. 96.

pendidikan sekaligus mempersatu sekolah-sekolah yang didirikan Ulama tradisional (Kaum Tuo) di Minangkabau.

Cikal bakal berdirinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang berawal dari pendidikan di Surau Baru yang di bangun oleh Syekh sulaiman ar-Rasuli bersama masyarakat pada tahun 1908 dengan sistem non klasikal (*Halaqah*), belum memakai bangku-bangku dan papan tulis. Dari tahun ke tahun jumlah muridnya bertambah ramai. Ide perubahan Surau Baru Canduang menjadi madrasah diawali dari surat Syekh Muhammad Abbas Lawas Bukittinggi dan pembicaraan Demang dt. Batuah dengan Syekh Sulaiaman ar-rasuli. Intinya, Syekh Abbas dan Demang Dt. Batuah melihat bahwa orang-orang yang beraliran modern cepat maju, terorganisir, dan melakukan perubahan terhadap pesantren menjadi sekolah (*Madrasah*) yang dapat menyaingi sekolah-sekolah pemerintah. Untuk itu, mereka mengusulkan agar Inyik Canduang memperbaharui sistem pendidikan Surau baru dalam bentuk sekolah (Madrasah dengan sistem klasikal). Pada awalnya, Syekh sulaiman ar-Rasuli menolak gagasan ini. Tetapi, berkat upaya gigih dari Syekh Muhammad Abbas dan Sultain Dt. Rajo Sampono, akhirnya dapt menggugah hati Syekh sulaiman ar-Rasuli untuk mengubah pesantren yang menggunakan sistem Halaqah menjadi madrasah yang menerapkan sistem kalsikal. Sebenarnya, sistem sekolah yang demikian sejak tahun 1918 telah pernah dipraktekan oleh Darwis El-Majidi (meninggal di Mekkah), seorang murid Inyik Canduang di Tabek Lumpuh (*Baso*) dengan nama *Tarbiyah school*.<sup>28</sup>

Pada tanggal 5 Mei 1928, Syekh Sulaiman ar-Rasuli melakukan pembaharuan Pesantren Canduang menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, dengan syarat kitab-kitab yang diajarkan dalam sekolah tersebut tidak boleh keluar dari kitab Mazhab Syafi'i dan I'tikad ahlussunah wal jama'ah. Semula nama madrasah tersebut adalah Tarbiyattul Thullab. Akan tetapi, untuk menghindari kesamaan namadengan Madrasah

---

<sup>28</sup> Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*, (Quantum teaching: PT ciputat press group 2005), p. 107-11.



Thawalib, maka institusi tersebut dinamakan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang. MTI Canduang terdiri atas 7 (tujuh) kelas. Kelas VII pada dasarnya merupakan kelas khusus bagi murid kelas VI B yang tidak tamat di kelas VI A.

Pada awalnya, sumber dana pendirian gedung Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) berasal dari sumbangan masyarakat. Karena cara tersebut dinilai kurang berhasil, maka Syekh sulaiman ar-Rasuli bermufakat dengan Demang Dt. Batuah yang mengusulkan agar upaya mendirikan gedung Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) dilakukan melalui prosedur Adat, yaitu dengan cara mengadakan Rapat Ninik Mamak 3 kelurahan (Baso, Canduang dan IV Angkat) serta kepala-kepala Nagari di 3 kelurahan yang bertempat di sebuah Rumah Gadang dekat masjid Baso dan dihadiri kira-kira 40-45 Ninik Mamak. Cerdik Pandai ditambah Kepala Nagari masing-masing daerah. rapat tersebut memutuskan agar masing-masing Kepala Nagari membangun sebuah Madrasah yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) secara adat. Adapun biayanya dipikulkan kepada seluruh masyarakat.

Atas anjuran Demang Dt. Batuah yang kemudian diputuskan dalam kerapatan agari Canduang Koto Lawas, bahwa Pekan Khamis Usang diserahkan kepada Syekh Sulaiman ar-Rasuli untuk mendirikan Madrasah . kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh Ninik Mamak dan anggota kerapatan Nagari. Dalam waktu + 59 hari, gedung Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang semi permanen siap dibangun (1929) dengan berlantai semen, atap seng, dinding tadie berlapis pasir dan berkapur putih, dan kapasitas 8 lokal. Dengan berdirinya gedung Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, maka institusi ini kemudian menjadi induk madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah seluruh Indonesia dan Partai Islam PERTI selama 23 tahun ( 1946-1969).

Kesadaran kalangan Kaum Tuo dalam merubah lembaga pendidikannya menjadi Madrasah dengan sistem klasikal dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Mereka melihat kenyataannya bahwa surau-surau mereka sudah lengang akibat banyak murid yang pindah

kepada pendidikan Government, madrasah Diniyah dan Sumatera Thawalib yang lebih modern dan teratur. Setelah melakukan perubahan bentuk kelembagaan dan sistem pendidikannya, berangsur-angsur lembaga pendidikan Kaum Tuo mulai didatangi muridnya kembali. Melihat pertumbuhan dan perkembangannya madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah tersebut diatas, maka timbul keinginan Syekh Sulaiman ar-Rasuli untuk menyatukan ulama-ulama Kaum Tuo, terutama pengelola madrasah-madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk mewujudkan rencana besar ini Syekh Sulaiman ar-Rasuli mensponsori sebuah pertemuan besar di Canduang pada tanggal 5 Mei 1928. Sebelumnya Syekh Sulaiman ar-Rasuli menugaskan dua orang muridnya, yaitu Sultani dan Damrah untuk melobi ulama-ulama Kaum Tuo di tempat mereka masing-masing. Pada hari yang telah ditentukan berlangsunglah pertemuan besar Kaum Tuo di Canduang Bukittinggi. Pertemuan ini langsung di hadiri oleh hampir seluruh ulama besar penganut Mazhab Syafi'i di Minangkabau.

Adapun tujuan pertemuan tersebut dilatarbelakangi adanya pemikiran bahwa untuk memperoleh kemajuan yang lebih pesat, maka sistem pengajaran agama harus diperbaharui. Diantara hasil pertemuan tersebut adalah berupaya merumuskan suatu konsep perbaikan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan agama yang selama ini dipergunakan pada lembaga pendidikan ulama Kaum Tuo. Adapun upaya perubahan dan pembaharuan tersebut dilakukan melalui upaya mengubah sistem halaqah menjadi sistem klasikal yang disebut "*madrasah*" dalam bentuk baru dan seragam pada setiap daerah.

Pada tanggal 20 Mei 1930 (2 tahun kemudian), atas prakarsa Syekh Sulaiman ar-Rasuli, para ulama Sunniah-Syafi'iyah (Kaum Tuo) melakukan Musyawarah untuk menyusun kepengurusan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang definitif. Pada musyawarah tersebut terpilih S. Dt Rajo Sampono (kemudian dikenal dengan Buya H. Sulthani Dt. Rajo Dubalang) sebagai ketua, T.M. Gazali sebagai sekretaris, dan H.M.S. Sulaeman sebagai

bendahara. Pengesahan kepengurusan tersebut dilakukan beretmpat di bawah Beringin Enam di Baso Bukittinggi yang di hadiri oleh alim Ulama, Ninik Mamak cerdik pandai, dan disaksikan oleh masyarakat setempat.<sup>29</sup>

Ide Syekh sulaiman ar-Rasuli untuk melakukan perubahan Surau Baru menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang tidak bisa dilepaskan dari dorongan teman-temannya, seperti Syekh Muhammad Jamil Pakih Malano Jaho Padangpanjang dan Syekh Abdul Wahab Shalihi Tabek Gadang Payakumbuh . mereka kemudian mendirikan Madrasah tarbiyah Islamiyah di tempat masing-masing, yaitu Syekh sulaiman ar-Rasuli mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, Syekh Muhammad Jamil Pakih Malano Jaho mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Jaho Padangpanjang, dan Syekh Abdul Wahab Shalihi mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tabek Gadang Payakumbuh. Sampai saat ini, ketiga Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) ini masih tetap eksis dalam mengembangkan program pendidikannya. Akan tetapi, sesudah musyawarah I tanggal 20 Mei 1930 di Canduang dan berdiri beberapa Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di beberapa daerah, timbul masalah baru, yaitu bagaimana mengatur, memelihara dan mengembangkan madrasah-madrasah tersebut agar perkembangan dan kelangsungan hidupnya terjamin. Untuk memecahkan masalah ini, maka pada tanggal 28 Mei 1930 diadakan Musyawarah II di Canduang. Dalam Musyawarah ini di sepakati dan diputuskan untuk mendirikan suatu organisasi yang disebut Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang bertugas untuk mengelola semua madrasah-madrasah yang berada di bawah nanungannya.

Dengan berkembangnya tuntutan zaman, maka MTI Canduang melakukan beberapa perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum pendidikannya. Untuk pendidikan madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah), kurikulum yang dipergunakan adalah kurikulum yang dipergunakan adalah kurikulum nasional. Namun demikian, visi tafaqquh fi

---

<sup>29</sup> Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran pendidikan Islam...*, p. 110-113.

al-din masih tetap dominan pada institusi ini. Sedangkan untuk pendidikan qismul Ali (pendidikan pesantren tradisonal), kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang dirumuskan di Yayasan MTI Canduang. Sampai tahun 2003, jumlah tenaga pengajar di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang sebanyak 30 orang guru, yang meliputi : 2 orang PNS, 2 orang guru kontrak, dan 26 orang guru tetap yayasan, serta dibantu 12 orang karyawan. Sampai saat ini, MTI Canduang masih tetap eksis di bawah pimpinan anak Inyiaq Canduang, yaitu Buya Bahrudin ar-Rasuli.<sup>30</sup>

Ketika terbentuknya organisasi ini ada 7 Madrasah Tarbiyah Islamiyah kepunyaan kaum Tua yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1930 PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum, yang oleh karena itu tahun 1930 disebut juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Jumlah ulama yang menggabungkan diri dengan PTI cukup banyak.

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konfrensi tanggal 11-16 Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan Tarbiyah Islamiyah berubah menjadi PERTI. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu:

1. Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu.<sup>31</sup>
2. Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan.
3. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah.
4. Memperkukuh silaturahmi sesama anggota.
5. Memperkukuh dan mempekuat ‘adat nan kawi, syara’ nan lazim” dalam setiap negeri.

---

<sup>30</sup> Karel A. Steenbrik, *Pesantren,sekolah,madrasah*, (Jakarta: LP3ES. 1974), p. 64.

<sup>31</sup> Nelmawarni, *Persatuan Tarbiyah* Nelmawarni, dkk, “*Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)*”, dalam *Sosiohumanika 16B (1)*, (Padang: IAIN-IB Press. 2003), p. 53.

## **B. Dinamika Perkembangan PERTI di Minangkabau**

Diperkirakan pada tahun 1942 sudah terdapat 300 sekolah PERTI dengan 45.000 murid. Sekolah-sekolah tersebut tidak merupakan persatuan yang ketat, diantaranya terdapat perbedaan sifat dan tingkat. Dalam PERTI, termasuk surau kecil maupun surau besar, dimana diajarkan agama pada tingkat tinggi maupun tingkat rendah, semua disebut *Madrasah PERTI*. Akan tetapi dengan memasukkan sistem klasikal, madrasah PERTI ini belum memasukkan perubahan isi pendidikan. Pada beberapa surau pengajian Alquran atau pengajian kitab kitab yang tradisional hanya diselenggarakan menurut sistem klasikal. Namun pada surau yang lain, dimasukkan juga beberapa mata pelajaran dari sekolah *gubernemen*. Sampai tahun 1947 sekolah PERTI, yang memasukkan mata pelajaran umum belum begitu banyak. organisasi ini juga aktif diluar bidang pendidikan, khususnya membangun sejumlah masjid darumah yatim piatu. Sesudah 1945 PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi). Ketika Belanda mulai mengusik masalah-masalah seperti undang-undang Guru, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Menentang masalah itu Kaum Tua bangkit dan secara berangsur-angsur berpikir kearah politik dan Semenjak tahun 1945, PERTI merupakan partai politik yang merupakan sebagian besar pengaruhnya terbatas di Minangkabau dan beberapa cabang di Sumatera Selatan.<sup>32</sup>

Pada periode-periode berikutnya, terutama pada masa Ekawibawa Bung Karno, dalam mengikuti gagasan NASAKOM telah menimbulkan pro dan kontra dalam tubuh PERTI. Kemelut yang kurang terbenahi ini kenyataannya sangat merugikan bagi tujuan semula dari organisasi ini. Pengelolaan bidang pendidikan, dakwah dan sosial seolah-olah terabaikan kalau tidak dapat dikatakan terlupakan sama sekali. Oleh karena itu, pada tahun 1969 Syekh Sulaiman Ar-Rasuly pendiri organisasi ini satu-satunya yang masih hidup pada waktu itu, mendekritkan agar kembali kepada *khittah* semula, yaitu status non politik. Dekrit

---

<sup>32</sup> Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Sekolah, madrasah...*, p. 64.

sesepuhnya itu hanya di diterima oleh sebagian saja, yang dipimpin Baharuddin Ar-Rasuli. yang kemudian menyalurkan aspirasi politiknya bergabung dengan GOLKAR. Adapun sebagian lagi yang tidak menerima dekrit tersebut tetap sebagai anggota partai politik dan ikut dalam pemilihan umum 1971. Khusus bidang pendidikan, MTI semakin berkembang pesat. Hingga pada tahun 1937, tercatat sebanyak 137 MTI di Minangkabau, dan di beberapa tempat luar Minangkabau. Pada tahun 1938, didirikan pula sebuah madrasah khusus untuk putri, yaitu MTI putri di Bengkawas, Bukittinggi yang dipimpin Ummi Hj. Syamsiah Abbas dimana pada tahun 1940 tercatat memiliki murid sekitar 250 orang. Bahkan pada tahun 1937, misalnya, jumlah murid di MTI Jaho mencapai sekitar 700 orang, kemudian MTI Candung dengan jumlah murid sebanyak 500 orang, dan pada tahun 1938 mencapai 500 orang murid. Sedangkan pada tahun 1942, sudah terdapat 300 MTI di berbagai daerah dengan 45.000 murid.<sup>33</sup>

Isu yang mengatakan PERTI hanyalah organisasi lokal dan partai kecil, kelihatannya membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Deliar Noer, pada tahun 1945 saja organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir diseluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar pulau sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan anggota sekitar 400.000 orang. Ditahun ini, juga tercatat 350 buah madrasah milik perti sejak zaman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu dipertegas lagi, tidak mustahil organisasi “kaum tua” yang mengklaim dirinya sebagai pengikut *Ahlussunnah Waljama'ah* dan mazhab Syafi'i ini, mempunyai banyak studi yang menarik untuk dikaji. Kini, nama besar MTI tampaknya lebih didominasi oleh kejayaannya pada masa lampau. Meskipun beberapa MTI masih bertahan dan cukup diminati oleh masyarakat seperti MTI Candung, MTI Pasir, MTI Jaho dan lainnya, akan tetapi secara umum MTI mulai kehilangan nama. Tak bisa dipungkiri, banyak MTI yang kualitasnya di

---

<sup>33</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1980), p. 241-245.

bawah standar, kurang terurus, kondisi fisik serta tenaga pendidik dan kependidikan demikian memprihatinkan. Padahal, dari MTI telah banyak melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hingga kini, kiprah alumni MTI pun cukup terasa baik di bidang akademisi, maupun sosial-politik.

Menyikapi persoalan ini, hemat penulis MTI mesti melakukan reorientasi sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan yang menekankan *Tafaqqahu fi al-Din* dan memelihara mazhab Imam Syafi'i. Dalam hal ini, MTI mesti melakukan reorientasi kurikulum. Orientasi MTI adalah mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat *Tafaqqahu fi al-Din*, sebagaimana pesantren lain yang berkembang di tanah Jawa. Hanya saja, *Tafaqqahu fi al-Din* yang dikembangkan berpahamkan *Ahlussunnah wal-Jamaah* dengan fiqh Imam Syafi'i, teologi al-Asy'ari dan al-Maturidhi serta tasawuf al-Ghazali. Untuk itu, setiap MTI mesti memiliki bidang-bidang tertentu, seperti tafsir, hadis, fiqh, atau gramatika bahasa Arab (Nahu, Sharaf, dll.). Namun, saat ini kurikulum yang diterapkan di MTI terlalu banyak. Paling tidak ada tiga bentuk mata pelajaran yang diajarkan kepada santri yaitu:

1. Mata pelajaran umum yang biasa diterapkan di sekolah umum
2. Mata pelajaran agama yang biasa diterapkan di MTs atau MA, dan
3. Mata pelajaran khusus pesantren.<sup>34</sup>

Akibatnya, setumpuk mata pelajaran tersebut membebani santri sehingga mereka sulit menguasai ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori *tafaqqahu fi al-din* secara mendalam. MTI termasuk pesantren yang juga mengalami persoalan ini mesti memperjuangkan ke tingkat pusat agar MTI dan pesantren yang sejenis diberikan kebebasan untuk mendesain kurikulum yang bersifat *tafaqqahu fi al-din* tersebut. Jika mata pelajaran umum harus ada sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas no. 22, 23, dan 24 hendaklah

---

<sup>34</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942...*, p. 241-245.

mendasar saja. Sementara mata pelajaran yang diterapkan di MTs dan MAS tidak perlu lagi diberlakukan, karena substansi mata pelajaran yang bercorak *Tafaqqahu fi al-Din* tersebut tentu melebihi dari yang diharapkan. Hanya saja, MTI juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia modern, tanpa harus menghilangkan karakteristik dasarnya. Dalam hal ini, MTI perlu mendesain kurikulum yang bercorak *tafaqqahu fi al-din* tersebut secara lebih terstruktur, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberlakukan dalam KTSP. Artinya, setiap guru/ustadz/syekh juga diharapkan terampil mendesain kurikulum mulai dari merencanakan, menerapkan hingga mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap materi yang diberikan. Selain itu, perkembangan IT yang demikian pesat juga perlu dikuasai oleh setiap santri sehingga MTI tidak terkesan tradisional-konvensional yang ketinggalan zaman.

Lalu ada pula yang beranggapan MTI sebagai lembaga pendidikan formal mesti mampu menyiapkan lulusannya ke PTU. Karenanya telah dibuka pula jurusan umum, seperti IPA dan IPS di tingkat Madrasah Aliyah. Kebijakan itu bisa diteruskan dan dikembangkan. Akan tetapi, jurusan keagamaan yang bercorak *Tafaqqahu fi al-Din* tersebut mesti lebih besar dan diutamakan, sehingga MTI tidak mengalami pergeseran dari orientasi semula. Selain dari orientasi kurikulum, aspek manajerial MTI pun mesti ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal. Pengelola MTI hendaklah berjiwa ikhlas sebagaimana yang telah diajarkan para pendiri terdahulu. Bukankah Syekh Sulaiman ar-Rasuli pernah mengkhawatirkan perubahan dari *halaqah* kepada klasikal akan berdampak kepada ketidakikhlasan guru dalam mengajar karena gaji yang mulai ditetapkan. Meskipun akhirnya ia menyetujui dan memotori perubahan itu, akan tetapi nilai-nilai keikhlasan tersebut haruslah dipertahankan.<sup>35</sup>

Di samping syarat keikhlasan, para pemimpin/pengelola MTI diharapkan memiliki *skill leadership* yang unggul dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Mereka

---

<sup>35</sup> <http://tarbiyahcanduang.wordpress.com/profil/> Tanggal 12 november 2015



dituntut membuka tangan terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman, tanpa harus mengorbankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi kepada *Tafaqqahu fi al-Din*. Kemudian, peran alumni perlu pula dioptimalkan. Alumni MTI saat ini banyak ditemukan di berbagai instansi dan profesi, mulai dari guru, politisi, pegawai, akademisi, bahkan guru besar pun banyak lahir dari MTI. Optimalisasi peran alumni juga dapat diorganisir melalui organisasi PERTI yang notabenehnya diduki oleh alumni MTI. Persoalannya adalah kemanakah orientasi PERTI? Sebaiknya orientasi PERTI lebih menekankan pada aspek pendidikan dari pada aspek politik. Konsekuensinya, pengurus PERTI pun dituntut memiliki pemahaman yang lebih terhadap urusan pendidikan dari pada urusan politik sehingga visi-misi serta program strategis PERTI lebih banyak mengurus dan memperhatikan pendidikan dibanding politik. PERTI harus realistis, umat memang butuh peran PERTI dalam sosial-masyarakat, termasuk politik, akan tetapi bidang pendidikan melalui MTI lebih membutuhkan lagi. Melalui pendidikanlah perjuangan PERTI akan tetap berkelanjutan. Tanpa adanya perubahan dan kepedulian orang-orang yang dibesarkan dari MTI, agaknya MTI akan mengalami mati suri dan kejayaannya hanya menjadi prasasti di kemudian hari. Maka Milad PERTI ke-82 ini hendaknya menjadi momentum bagi alumni dan masyarakat Sumatera Barat terhadap peningkatan kualitas Madrasah Tarbiyah Islamiyah. MTI adalah aset Sumatera Barat, lembaga pendidikan yang lahir di ranah Minangkabau yang sarat dengan agama dan adat serta terkenal dengan filosofis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.<sup>36</sup>

### **C. Pergerakan PERTI di Minangkabau**

Khusus bidang pendidikan, MTI semakin berkembang pesat. Hingga pada tahun 1937, tercatat sebanyak 137 MTI di Minangkabau, dan di beberapa tempat luar Minangkabau. Pada tahun 1938, didirikan pula sebuah madrasah khusus untuk putri, yaitu

---

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (PT Hidakarya Agung Jakarta), p. 97-100.

MTI putri di Bengkawas, Bukittinggi yang dipimpin Ummi Hj. Syamsiah Abbas dimana pada tahun 1940 tercatat memiliki murid sekitar 250 orang. Bahkan pada tahun 1937, misalnya, jumlah murid di MTI Jaho mencapai sekitar 700 orang, kemudian MTI Candung dengan jumlah murid sebanyak 500 orang, dan pada tahun 1938 mencapai 500 orang murid. Sedangkan pada tahun 1942, sudah terdapat 300 MTI di berbagai daerah dengan 45.000 murid. Di antara madrasah-madrasah PERTI yang terkenal dan sangat berperan dalam mendidik anak bangsa adalah MTI Candung. Berikut ini adalah perkembangan MTI Candung dari masa ke masa. Pada Tahun 1928-1957, kurikulum MTI Candung 100% agama dengan memakai kitab kuning. Di antara kitab-kitab tersebut adalah: Matan Taqrib (Fathul Qarib), Fathul Mu'in, Al-Mahalli, Waraqat (Al-Luma), Jam'ul Jawami', Sanusi, Kifayatul Awam, Ummul Barahin, Ajrumiyah/Mukhtashar, Syekh Khalid/Azhari, Qathrun Nada, Ibnu Aqil, Kailani/Taftazani, Jalalain, Baidlawi, Hadist arba'in, Bukhari/Muslim, Baiquniah, Jauharul Maknun, Talkhis, Sullam/Idlahul Mubham.

Serta kitab-kitab yang dikarang oleh Ulama PERTI sendiri seperti Bidayatul Balaghah dan Khulashah Tarikh Islam (H. Sirajuddin Abbas), Bidayat Tauhid (H.Rusli), Hidayatut Thalabah (H.Mansur) dan lain-lain. Adapun pembangunannya ialah alim Ulama yang masyhur di Minangkabau, yaitu :

1. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Canduang Bukittinggi.
2. Syekh M.Jamil Jaho, Padang Panjang.
3. Syekh Abbas lawas, Bukittinggi.
4. Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang, Suliki.
5. Syekh M.Arifin Batuhampar, Payakumbuh.
6. Syekh Khatib Ali, Padang.
7. Syekh Makhudum, Solok.
8. Syekh M.Yunus Sasak Pasaman.

Pada masa itu perkumpulan ini berwujud ini berwujud untuk memajukan pendidikan dan pengajaran Islam dengan membangun surau-surau dan sekolah-sekolah Agama (Madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah). Tidak beberapa lama Madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah berkembang dan tersebar di seluruh Minangkabau dari kota sampai ke desa-desa. Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang tertua dan tersebar ialah:

1. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, Bukittinggi (Didirikan pada tahun 1907 sebelum lahirnya Tarbiyah Islamiyah oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli).
2. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tabek Gadang (Didirikan pada tahun 1906 oleh Syekh Abdul Wahid).
3. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho Padang Panjang (Didirikan oleh Syekh M.Jamil).
4. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batuhampar (Didirikan pada tahun 1000 sebagai perguruan Quran yang termasyhur di Minangkabau).

Dan konferensi Tarbiyah Islamiyah ke-1 tanggal 20 Mei 1930 diputuskan, bahwa perkumpulan ini berdasarkan Islam menurut Mazhab Ahli sunnah Wal jama'ah dalam Itiqad dan menurut Mazhab Imam Syafi'i dalam syariat dan ibadah. Diantara tujuan Tarbiyah Islamiyah yang terpenting ialah untuk:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran Islam di tengah-tengah masyarakat dengan memperhebat penyiaran agama, baik dengan lisan (tabligh) atau dengan tulisan (menerbitkan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya).
2. Memajukan amal-amal sosial dan ibadat dengan membangunkan langgar-langgar, mushalla dan masjid-masjid.
3. Mendirikan madrasah-madrasah, mulai dari tingkat rendah sampai tingkatan tinggi.

Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945) dan setelah keluar maklumat pemerintah R.I tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan untuk mendirikan partai-partai politik, maka Tarbiyah Islamiyah diputuskan dengan suara bulat untuk dijadikan partai politik

Islam dengan nama: *Partai Islam Perti*, yaitu pada tanggal 22 November 1945. Dalam kongres Partai Islam Perti di Jakarta tanggal 11 Agustus 1955 diputuskan untuk memindahkan Pusat Pimpinan Partai dari Bukittinggi ke Jakarta. Menurut Anggaran Dasar PERTI yang baru (sesudah menjadi partai politik), adalah sebagai berikut:

Azas partai PERTI ini adalah: Kalimatullahi Hiyyal ‘Ulya (ketinggian Agama Islam) dengan arti kata yang seluas- luasnya (pasal 3).

Untuk mencapai tujuan itu partai berusaha :

- a. Memperdalam rasa cinta terhadap agama, bangsa dan tanah air.
- b. Memajukan pendidikan, pengajaran dan kecerdasan rakyat.
- c. Memperhebat penyiaran dan pertahanan Agama Islam.
- d. Memajukan perekonomian dan mengusahakan kemakmuran rakyat.
- e. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia.

Madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah tersebar seluruh Minangkabau, bahkan sekarang telah tersebar di luar Minangkabau. Menurut catatan resmi, bahwa jumlah madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah seluruhnya kurang lebih 300 buah terdiri dari tingkatan Awaliah, Ibtidaiya, Tsanawiyah dan Kulliyah Syar’iyah bagian putera dan puteri Bukittinggi.<sup>37</sup>

Lain daripada itu Tarbiyah Islamiyah menerbitkan buku-buku agama untuk pelajaran di madrasah-madrasah, bahkan juga menerbitkan majalah-majalah seperti:

1. Suarti (Suara Tarbiyah Islamiyah).
2. Al-Mizan (huruf Arab).
3. PERTI Bulletin.

---

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia...*, p. 97-100.

Kemudian mulai tahun 1957, kurikulum MTI Candung telah mengadopsi kurikulum umum dan berkembang secara bertahap sampai munculnya SKB tiga menteri 1974 dengan rasio: 70% agama dan 30% umum, dan tetap berlaku sampai sekarang.

#### 1. Fase Perkembangan Pendidikan MTI Candung di Masa Syaikh Sulaiman ar-Rasuli.

Tahun 1908 merupakan sistem halaqah sebagai awal pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung yang bertempat di Surau Baru, berakhir pada tahun 1928. Di tanggal 5 Mei 1928, maka pendidikan madrasah mulai diberlakukan dengan memakai sistem kalsikal dengan lama pendidikan adalah 9 tahun.

Pada tanggal 20 Mei 1930 organisasi yang dirintis bersama akhirnya tuntas dalam suatu bentuk pembahasan yang intensif yang disebut dengan “Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)”, kondisi ini berjalan sampai tahun 1945 dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang telah berkembang di Indonesia Pada tanggal 24 September 1936, diadakan suatu rapat di Candung yang dihadiri oleh ketua dan para guru Madrasah Tarbiyah Islamiyah dengan salah satu keputusannya adalah menyamakan kurikulum bagi seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Indonesia.<sup>38</sup>

Kemudian di tahun 1938, Persatuan Tarbiyah Islamiyah mengadakan Mukhtamar di Bukittinggi yang intinya memutuskan untuk menyusun rencana kurikulum berupa daftar pelajaran yang diseragamkan untuk seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah Memasuki tahun 1950, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung mulai didaftarkan pada Departemen Agama serta tahun 1970 kembali didaftarkan untuk kedua kalinya, sehingga perencanaan tersebut mendapat kendala dengan sikap masyarakat yang menentang masuknya pelajaran yang ditawarkan Departemen Agama karena ada bentuk kekhawatiran yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan tarbiyah akan “dihapuskan” Tahun 1961 berdirilah sebuah yayasan sebagai tempat bernaungnya sebuah pendidikan swasta yang dinamakan

---

<sup>38</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006), p. 128- 135.

dengan Yayasan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy. Yayasan ini bertugas untuk memikirkan, merencanakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pembangunan, dan perbaikan madrasah ini.

Berakhirnya Fase Kepemimpinan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy Pada tahun 1965 M, seiring kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka jabatan sebagai pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung diserahkan kepada H. Baharuddin ar-Rasuli Jabatan pimpinan yang ia tekuni tidak ada perubahan dari kepemimpinan yang dipegang oleh Ayah beliau.

## 2. Fase Kepemimpinan Buya H. Baharuddin ar-Rasuliy (1965-1971)

Seluruh operasional madrasah dikelola oleh H. Baharuddin ar-Rasuliy dengan adanya persetujuan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy. Kebijakan-kebijakan pimpinan tetap dipegang oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy secara substansif.

## 3. Fase Kepemimpinan Buya H. Syahrudin ar-Rasuly (1971-2005)

Pada tahun 1977, PB. Persatuan Tarbiyah Islamiyah terlibat dalam pengaturan pengelolaan madrasah ini dengan melahirkan direktorium madrasah yang terdiri dari lima orang yang akan mengendalikan perkembangan madrasah, diantara mereka adalah H. Baharuddin ar-Rasuli, H. Syahrudin ar-Rasuli, H. Moh. Nur ar-Rasuli, H. Izzuddin Marzuki, dan Abdullah Ali. Mereka yang disebutkan mempunyai tugas sebagai perencana dan pelaksana pendidikan madrasah agar dapat dijalankan dengan baik. Kondisi yang seperti tetap berjalan sampai pada tahun 1994.

Pengelompokkan Kurikulum semenjak 1994-2008:

- A. Pelajaran Agama adalah : Fiqh, Hadits, Tauhid, Tafsir, Tashauf, Ushul Fiqh, Mantiq, Mushthalah
- B. Pelajaran Bahasa adalah: B. Arab, B. Inggris, B. Indonesia, Nahwu, Sharaf, Qawa'id, Balaghah

C. Pelajaran Umum adalah: KWN (kewarganegaraan), Ilmu Jiwa, Sejarah Umum, Geografi, Antropologi, IPS (Ilmu Pengetahuan sosial), IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Ilmu Komputer

4. Fase Kepemimpinan Buya H. Muhammad Noer ar-Rasuliy (2004-2006)

Kepemimpinan yang beliau jalankan sebagai Rais al-'Aam merupakan usaha untuk membantu kepemimpinan yang dipegang oleh Buya H. Syahrudin ar-Rasuliy sebagai Syaikh al-Madrasah.

5. Fase Kepemimpinan Buya Badra Syahrudin ar-Rasuliy 2005-2007

Kepemimpinannya sebagai Rais al-'Aam, dibimbing oleh Buya H. Muhammad Noer ar-Rasuliy yang menjabat sebagai Syaikh al-Madrasah menggantikan posisi Buya H. Syahrudin ar-Rasuliy yang wafat pada 24 Desember 2005.

6. Fase Kepemimpinan Buya H. Amhar Zen ar-Rasuliy (2007-2008)

Kepemimpinan Buya H. Amhar Zen ar-Rasuliy merupakan usaha untuk melanjutkan kepemimpinan Buya Badra Syahrudin sehubungan dengan kesibukan yang beliau emban sebagai pegawai tata usaha Universitas Andalas.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional...*, p. 128-135.





**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN PERTI PADA MASA KEPEMIMPINAN**  
**M SULAIMAN AR-RASULI DI MINANGKABAU**  
**TAHUN 1930-1970**

**A. Keadaan Minangkabau pada Masa Kepemimpinan M Sulaiman Ar-Rasuli**

Minangkabau kini sebagian besar wilayahnya termasuk provinsi Sumatera Barat dari segi sosiokultural dan agama mempunyai karakteristik unik di bandingkan sukubangsa-sukubangsa lainnya di Indonesia. Karena itu fenomena sosiokultural dan keagamaan di Minangkabau tetap menarik. Minangkabau dikatakan daerah yang unik. Karena di daerah ini berlaku sistem sosial yang bersifat matrilineal. Menurut sistem ini, garis keturunan seseorang di tarik dari pihak ibunya. Begitu pula dalam sistem pembagian harta pusaka, sawah ladang, dan tempat kediaman, kaum wanita menduduki tempat dominan. Seperti dilukiskan dalam *kaba* (legenda) *cindua mato*, wanita dalam hal ini Bundo Kandung sebagai Ratu adalah *rajo usali* (raja yang sebenarnya). Sementara putranya Dang Tuanku sebagai “raja alam” hanya berfungsi melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Bundo Kandunglah yang menjadi sumber pengetahuan, kebijaksanaan, dan adat istiadat bagi Dang tuanku.<sup>40</sup>

Kedudukan Bundo Kandung sebagai *rajo usali* lebih lanjut adalah kedudukan yang sudah ascribed: status yang di percayai muncul bersamaan dengan terciptanya alam Minangkabau. Wanita yang di representasikan Bundo Kandung adalah “makhluk asli” yang utama dan pertama dalam penciptaan alam Minangkabau. Meskipun Minangkabau menganut sistem sosial matrilineal, namun dalam hal sistem kekuasaan ia bukanlah *matriarchaat*. Kekuasaan pada praktiknya dalam kehidupan sehari-hari dipegang *mamak* saudara laki-laki ibu. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan tidak berada di tangan wanita, seperti terdapat

---

<sup>40</sup> Alfian dan Dewi Fortuna Anwar, “Wanita Dalam Masyarakat Minangkabau”, dalam kumpulan Naskah Simposium Pengaruh Adat Istiadat Minangkabau Terhadap Kehidupan Wanita Dalam Mengembangkan Budaya Bangsa, (Panitia Penyelenggara Simposium Yayasan Bunda, Jakarta, 7 April 1973), p. 157-158.

dalam sistem kekuasaan *matriarchaat*. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan peranan sendiri-sendiri yang sama-sama penting. Jika kedudukan laki-laki, pada segi lain di pandang “rendah” dan tidak berkuasa apa-apa dalam pepatah Minang disebut bagi “*abu diatas tunggal*” adalah dalam konteks hubungan yang terjadi melalui perkawinan. Dalam hal ini, suami (*orang sumando*) menurut adat Minangkabau tidak berkuasa atas anak maupun harta dalam keluarga istrinya. Anak-anaknya berada dalam kekuasaan *mamaknya*. Si suami tersebut hanya berkuasa dalam keluarga asalnya sebagai mamak dari kemenakannya tidak dalam keluarga istrinya. Karena itu, jika ia bercerai dengan istrinya, si suami tadi keluar dari rumah hanya membawa pakaian yang melekat di tubuhnya.<sup>41</sup>

Sistem adat Minangkabau yang khas itu semakin unik bila dilihat dalam hubungannya dengan Islam. Menurut filsafat hidup Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Keduanya berjalan seiring tanpa harus terlibat konflik, karena adat sebagai instuisi kebudayaan dalam masyarakat mendapat posisi selaras dan harmoni dengan agama. Hubungan adat dan agama yang demikian dengan indah di ungkapkan dalam pepatah; “*Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Syara mangato adat memakai. Cermin nan tidak kabua palito nan tidak padam*”. (Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Syara menyatakan, adat mengejawantahkan . cermin yang tidak buram, pelita yang tidak padam).<sup>42</sup>

Hubungan adat dan agama lebih lanjut di gambarkan dalam lambang kelengkapan sebuah *nagari*. Lambang *nagari* di Minangkabau adalah bakal adat dan masjid. Tidak lengkap dan sempurna suatu nagari apabila salah satu dari yang dua tidak ada. Balai adat adalah lembaga kebudayaan, sedangkan masjid merupakan lembaga agama. Kedudukan masjid disamping balai adat merupakan pernyataan keharmonisan antara ninik mamak dan alim ulama dalam masyarakat minangkabau.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, (Jakarta: Tekad, 1963), p. 158.

<sup>42</sup> Rajo Penghulu, Idrus Hakimi, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: CV Rosada), p. 158-159.

<sup>43</sup> Gazalba, Sidi, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1983), p. 291.

Bagaimanapun, hubungan antara adat dan agama demikian, jika di telusuri dari sejarah Minangkabau sesungguhnya tercapai setelah melalui proses cukup panjang, dan berkaitan erat pula dengan konsepsi “Alam Minangkabau”. Pola hubungan antara adat dan agama itu tercapai setelah berlangsungnya proses Islamisasi terus menerus dalam masyarakat Minangkabau, terutama dengan pengenalan ide-ide baru Islam yang dibawa orang Minangkabau yang kembali dari Mekah, Madinah, dan Kairo. Pembaruan dalam penghayatan dan pengalaman Islam inilah yang menimbulkan dinamika dan sekaligus konflik tersendiri dalam masyarakat Minangkabau.

Gerakan pembaruan Islam tak urung lagi menimbulkan krisis dalam masyarakat Minangkabau. Premis- premis kultural dan adat yang merupakan paradigma dominan selama ini mulai goyah. Keinginan sementara masyarakat Minangkabau mempertahankan validitas nilai dan premis kultural serta kebutuhan menutupinya dengan elemen baru yang dibutuhkan, menimbulkan konflik nilai dan sosial serta usaha yang tak kunjung berhenti guna merumuskan kembali konsepsi alam Minangkabau yang lebih sesuai dan selaras dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>44</sup>

Di dalam masyarakat dan tata nilai Minangkabau sendiri sebenarnya terdapat sikap ambivalen terhadap nilai tradisional yang di ekspresikan dalam pepatah-pepatah adat dan di ilustrasikan lewat tradisi *tambo* (sejarah) dan *kaba* (legenda-cerita kepahlawanan) menekankan kelanjutan nilai kebijaksanaan tradisi lama yang pada saat yang sama juga tidak meniscayakan pentingnya perubahan. Kedua hal ini menurut konsepsi alam Minangkabau sangat di perlukan untuk mewujudkan masyarakat sempurna. Namun, kekuatan pandangan dunia tradisional yang di representasikan dalam konservatisme adat harus berbenturan dengan sikap dinamis yang di munculkan individu-individu tertentu dalam masyarakat.

---

<sup>44</sup> Abdullah, Taufik, *School and Politics; The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971), p. 1.

Dengan demikian, dinamika dan konflik yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau merupakan refleksi dari pergumulan membina tatanan sosial yang harmonis dan mewujudkan harmoni antara aspek sosiokultural dan agama yang kelihatan selau bertentangan. Karena itu pula, sejak Islam masuk ke alam Minangkabau dan sebelum diterima sebagai salah satu pilar sosial masyarakat, selalu terlihat dalam sejarah usaha untuk mempertahankan keseimbangan yang dapat di terima antara sistem adat yang lebih dahulu hadir sebagai pilar masyarakat Minangkabau dengan doktrin Islam yang datang belakangan. Adanya pandangan yang menyatakan, bahwa Islam adalah bagian terpisah dari konsepsi alam Minangkabau mengakibatkan terjadinya dinamika internal yang konstan. Di samping itu, juga terdapat pandangan, ide-ide yang datang dari *rantau* (luar alam Minangkabau) dapat membahayakan keutuhan konsepsi alam Minangkabau atau sedikitnya dapat merangsang potensi dinamis intern dalam masyarakat Minangkabau untuk memunculkan pembaruannya. Semua situasi ini akhirnya menimbulkan sikap bercabang dua (*ambivalen*) terhadap usaha pembaruan.<sup>45</sup>

Gerakan pembaruan dalam Islam di Minangkabau muncul sejak dasawarsa terakhir abad ke-18, yang kemudian mengalami radikalisisasi, terutama ketika tiga orang haji kembali ke Tanah Suci pada 1803. Mereka ialah; Haji Miskin dari Luhak Agam, Haji Sumanik orang Luhak Tanahdatar, dan Haji Piobang dari Luhak Lima Puluh. Paham ajaran Islam yang mereka sebarkan kelihatan banyak terpengaruh gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang lebih terkenal sebagai “Gerakan Kaum Wahabi”. Maksud utama Gerakan Padri adalah membersihkan masyarakat Minangkabau dari adat buruk jahiliyah, misalnya; menyabung ayam, meminum tuak yang dicampur dengan darah kerbau, perang batu antarsuku, dan lain-lain kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran yang dibawa ketika Haji ini mendapat sambutan hangat dari delapan ulama terkemuka dari Lubuk Agam yang dipelopori

---

<sup>45</sup> Hamka, *Muhamadiyah di Minangkabau*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974), p. 7.

Tuanku Nan Renceh di kampung Bangsa Kumango, lalu disambut lagi oleh ulama-ulama lainnya di seluruh Minangkabau.

Gerakan Padri dengan segera menimbulkan konflik dan krisis dalam masyarakat Minangkabau. Keterangan amat memuncak; karena gerakan ini menolak perumusan yang ditawarkan kaum adat, bahwa: “ *adat bersendi syara.’ Syara bersendi adat*”. Lebih dari sekedar penyucian jiwa, Kaum Padri sangat menekankan manifestasi murni sikap keagamaan yang diartikan dalam tingkah laku lahiriah. Karena itu, mereka menuntut agar *syara’* di tempatkan diatas hukum adat dan segala hukum lainnya. Gerakan Padri militan ini bukan hanya mengutuk praktik bid’ah dan khurafat, tetapi langsung secara fisik mengatasinya, sehingga menimbulkan Perang Padri yang kemudian diintervensi Belanda pada 1821. Perang tersebut jika dikaji lebih jauh bukan hanya pertarungan antara pengikut agama militan dan pembela adat, tetapi juga sebenarnya merupakan konflik antara pandangan totalistik metafisis dengan pandangan keduniawian relatif.<sup>46</sup>

Ketika perang Padri berakhir pada 1837, jelas Gerakan Padri social, kultural dan politik di Minangkabau. Namun penting dicatat, ia berhasil memperkuat dan memperbesar pengaruh agama dalam system kemasyarakatan Minangkabau. Hal ini misalnya dapat dilihat dari perumusan baru, yaitu “*adat bersendi syara’, syara bersendi kitabullah*”. Formulasinya sistem adat baru diperkenalkan, dan menekankan perbedaan antara *adat jahiliyah* sinkretis dengan *adat Islamiyah*, yakni adat yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara ideal, adat kemudian dianggap sebagai manifestasi yang benar dari hukum agama. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, kedudukan ulama dan guru agama semakin kuat dan sekolah agama semakin banyak didirikan. Sejak awal abad ke-20 masyarakat Islam Minangkabau berada dalam situasi yang semakin terjepit. Pada satu pihak, ia menghadapi tekanan ekonomi dan politik

---

<sup>46</sup> Schrieke, BJO, *Pergolakan Agama Di Sumatera*, terj. Soegarda Perbakawatja, (Jakarta: Bharatara, 1973), p. 13-14.

yang kian berat dari colonial Belanda, sedangkan dipihak lain, ide-ide pembaharuan keagamaan dalam segenap aspeknya semakin gencar pula gaungnya.<sup>47</sup>

Pada 1908 Belanda memperkenalkan sistem pajak baru (*Blasting*) menggantikan monopoli dalam dunia perdagangan, terutama kopi yang dalam perempat abad ke-19 mengalami kemerosotan. Dari segi ekonomi, kebijakan ini menguntungkan rakyat, karena hasil pertanian dapat dijual dipasaran bebas. Tetapi rakyat melihat dari segi lain; dengan peraturan pajak baru itu berarti pemerintahan Belanda bukan lagi bertindak selaku “pelindung” Minangkabau, tetapi telah berlaku sebagai penguasa. Padahal, dalam plakat panjang yang ditandatanganinya sesuai Perang Paderi dicapai kesepakatan, tidak akan ada pajak langsung dikenakan atas masyarakat Minangkabau. Meskipun terjadi huru-hura di berbagai tempat di Minangkabau memperotes sistem *blasting*, namun kebijakan yang tetap di pertahankan Belanda itu menimbulkan perubahan ekonomi cukup penting. Sektor ekonomi kota semakin dominan terhadap ekonomi *nagari*. Akibatnya, *nagari* sebagai masyarakat yang *self-sufficient* semakin terbuka apalagi dengan diperkenalkannya pasar sekali sepekan secara bergilir di *nagari-nagari* berdekatan. Sementara itu, kota-kota di Minangkabau terus berkembang dan semakin banyak didatangi para perantau dari kampung-kampung sekitarnya. Para perantau ini kemudian bermukim di perkotaan bersama anak isterinya dalam keluarga *nuklir*. Perlahan tapi pasti, sistem keluarga *batih* yang selama ini dianut mulai tersaingi sistem keluarga nuklir. Proses ini menurut Taufik Abdullah, cenderung memperlemah hubungan *mamak-kemanakan* yang dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau merupakan salah satu aspek penting. Di dalam keluarga nuklir perantau, ayah setahap demi setahap mengambil peran saudara laki-laki isterinya (*mamak* anak-anaknya) yang selama ini turut bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Abdullah, Taufik, *School and Politics; The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*..., p. 9.

<sup>48</sup> Schrieke, BJO, *Pergolakan Agama Di Sumatera*, terj. Soegarda Perbakawatja..., p. 10.

Pengalihan tanggung jawab terhadap anak-anak dari mamak kepada ayah ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan surau. Di dalam keluarga nuklir perantau, anak laki-laki sudah cukup umur cenderung tidak disuruh berdiam di surau. Ia sudah punya “kamar” di rumah ibunya, karena jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah ibunya menjadi relative kecil. Dengan demikian, anak-anak kemudian berada di bawah kontrol langsung orang tuanya. Kalaupun anak-anak disuruh ke surau, itu sekedar untuk belajar membaca Al-Quran, tidak lagi bermalam dan bermukim disana. Sementara orang tua kian cenderung tidak menyerahahkan anak-anaknya ke surau, ketika itu pula Belanda mendirikan semakin banyak sekolah. Pertama kali Belanda mendirikan HIS (*Hollandsch-Inilandsche School*) di Bukittinggi pada 1850. HIS adalah semacam sekolah dasar bagi anak-anak Belanda dari pribumi. Sekolah ini kemudian terkenal sebagai “Sekolah Raja”, karena murid bangsa Indonesia yang diterima hanyalah atau kebanyakan berasal dari kalangan bangsawan (raja-raja). Kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda dari 1900-an membuat pemerintah kolonial Belanda harus menjalankan “*ethis che epolitiek*” dalam bidang pendidikan, ini berarti Belanda harus mendirikan lebih banyak sekolah untuk pribumi. Sejak awal 1910-an sekolah rakyat (*volkschoole*) mulai di dirikan sampai di *nagari-nagari* Miangkabau. Pada 1913 jumlahnya mencapai 111 dan meningkat lagi menjadi 358 pada 1915.<sup>49</sup>

Demikianlah, perkembangan politik, ekonomi, dan pendidikan tersebut menimbulkan perubahan hebat terhadap institusi-institusi dan pranata social Minangkabau. Kaum aristocrat dan para pengawal pemerintah dan kalangan pribumi (*native white collar*) yang kebanyakannya hidup di lingkungan masyarakat Belanda dan mendapatkan pendidikan di “Sekolah Raja” mulai memperkenalkan gaya hidup Belanda, baik melalui club-club social eksklusif maupun melalui surat kabar dan majalah yang mereka terbitkan. Pada 1901 mereka

---

<sup>49</sup> Schrieke, BJO, *Pergolakan Agama Di Sumatera*, terj. Soegarda Perbakawatja..., p. 11.

menerbitkan gagasan mengenai kemajuan yang berisikan pokok pikiran bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai *kemajuan*. Para guru berpendidikan Belanda yang menjadi penulis-penulis utama jurnal kelompok aristokrat dan pegawai ini menyatakan, cara untuk mencapai *kemajuan* ialah dengan merombak sistem pendidikan menjadi sistem pendidikan modern ala Barat. Karena itu, sekolah agama menurut mereka sudah ketinggalan zaman (*out of date*) dan harus berpengaruh hendaknya tidak lagi mengajar di lembaga pendidikan. Gagasan “kemajuan” semacam itu tak urung lagi menimbulkan konflik intelektual baru di Minangkabau. Tantangan utama terhadap gagasan itu datang dari kaum ulama. Konflik ini lebih tepat dilukiskan sebagai pertarungan antara kaum modernis sekuler dengan kaum ulama tradisionalis (kaum tua). Tantangan terhadap kaum modernis sekuler ini juga datang dari kaum adat tradisional (kaum kuno) karena menganggap, ide-ide kemajuan itu dapat mengancam konsepsi adat alam Minangkabau. Menurut kelompok terakhir ini, kemajuan hanya bisa dicapai dengan menggali dan mengelaborasi kembali gagasan adat dan budaya Minangkabau, bukan meninggalkannya dan menggantinya dengan gagasan Barat. Konflik intelektual ini semakin ramai, ketika beberapa ulama muda murid Syekh Ahmad Khatib kembali dari Tanah Suci. Ditokohi “Empat Serangkai” Syekh Muhammad Jamil Jambek di Bukittinggi, H. Abdullah Ahmad di Padang dan Padangpanjang, Syekh Abdul Karim (Haji Rasul) di Maninjau dan Padangpanjang, dan Syekh Muhammad Thalib Umar di Batusangkar mereka yang kemudian disebut “Kaum Muda” (agama) ini melancarkan serangan terhadap praktik ulama tradisionalis dan praktik kaum adat yang cenderung terlalu membesar-besarkan adat.<sup>50</sup>

Gebrakan kaum muda ulama semakin gencar ketika minangkabau memasuki dekade kedua abad ke-20. Banyak dipengaruhi gagasan pembaruan Muhammad Abduh, kaum muda menyerukan kepada umat untuk kembali kepada Al-Quran dan sunah dengan mengihilangkan

---

<sup>50</sup> Schrieke, BJO, *Pergolakan Agama Di Sumatera*, terj. Soegarda Perbakawatja..., p. 15.



sikap *Taqlid*, terhadap ajaran ulama atau mazhab tertentu. Keimanan atas dasar *Taqlid* menurut kaum muda, adalah tidak benar. Keimanan hendaklah disertai penggunaan akal untuk melakukan ‘ijtihad’. Tak kurang kerasnya, kaum muda menghantam praktik *tariqat* (Tareqat) yang menurut mereka bercampur baur dengan *bid’ah* dan *khurafat*. Menurut kaum muda, *tariqat* adalah semacam *escapism* (pelarian) yang mengakibatkan umat terlalu berorientasi pada akhirat, dan sekana-akan melupakan dunia hal ini lebih jauh mengakibatkan umat terbelakang. Gerakan pemurnian agama dengan kembali kepada Al-Quran dan sunah yang dilakukan kaum muda pada dasarnya merupakan langkah pertama untuk menggali etos Islam yang pada abad pertengahan mampu menghantarkan umat Islam kepada kejayaan. Para pembaru ini tidak di motivasi keinginan merombak dasar-dasar teologis Islam, tetapi lebih dengan harapan mempersiapkan dasar perubahan sosial yang dapat menciptakan masyarakat agama yang mampu berpikir rasional. Dengan demikian “kemajuan” kaum muda ulama Minangkabau haruslah dilihat sebagai renaissans Islam ketimbang transformasi dasar-dasar agama.<sup>51</sup>

Terlepas dari motivasi dan tujuan kaum muda ulama Minangkabau dalam gerakannya, yang jelas gagasan mereka secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan eksistensi surau selanjutnya. Serangan frontal terhadap praktik-praktik *tariqat*, secara implisit berarti pula serangan terhadap pendidikan surau. Karena memang surau selama ini disamping mengajarkan ilmu agama, juga banyak mengajarkan doktrin dan praktik *tariqat* dan suluk. Keunggulan kaum muda dalam menyebarkan gagasan melalui media massa yang mereka miliki mengakibatkan citra surau sebagai lembaga pendidikan Islam yang baik semakin memudar. Sementara itu, kaum muda semakin ekspansif dalam menerapkan gagasannya. Mereka mulai mendirikan sekolah agama yang telah dimodernisasi baik sistem, metode maupun kurikulumnya. Pengajaran bukan lagi di surau, tetapi sudah di kelas. Metode

---

<sup>51</sup> Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), p. 106.

pengajarannya bukan lagi halaqah tetapi klasikal dengan tingkatan kelas. Pembaruan seperti ini dilakukan guru agama dan kaum ulama dibekali ilmu dan alat untuk menghadapi tantangan kebutuhan zaman. Karenanya ilmu pengetahuan umum dan bahasa barat (Belanda dan Inggris) dimasukan kedalam kurikulum. Metode terbaik untuk mencapai kemajuan ekonomi dan pendidikan menurut kaum muda adalah melalui organisasi sosial. Karena itu, berbagai organisasi sosial yang terutama bergerak dalam pembaruan pendidikan agama didirikan kaum muda. Pada 1914, Syekh Abdullah Ahmad memprakasai berdirinya “Tariqat Oesaha” di Padang. Usaha awalnya adalah mendirikan HIS Adabiyah pada 23 Agustus 1915. Menjadi HIS pertama di Minangkabau yang memasukan pelajaran agama kedalam kurikulum.<sup>52</sup>

Pada 1918 berdiri pula perkumpulan “Sumatera Thawalib” yang mendirikan sekolah agama di Padang Panjang, Parabek, Batusangkar, dan Maninjau. Sumatera Thawalib ini juga menerbitkan majalah kaum muda. Selanjutnya pada 1920 organisasi persatuan guru-guru agama Islam (PGAI) berdiri di Padang. PGAI kemudian mendirikan *normal Islam*, sekolah modern untuk mempersiapkan guru agama Islam. Sementara itu dipadang panjang Zainudin Labay L Yunusi mendirikan *Diniyah Shool* pada 10 Oktober 1915, kemudian adiknya Rahmah L Yunusiah mendirikan *Diniyah School Putri* pada 1 november 1923. Berdirinya Muhammadiyah di Minangkabau pada 1925 membuat sekolah ala Belanda dengan matapelajaran agama semakin banyak jumlahnya. Bahkan, Muhammadiyah ,memiliki paling banyak sekolah di antara organisasi sosial keagamaan yang mempunyai sekolah. Sejak pertengahan dekade 20-an moderenisasi pendidikan agama berlangsung demikian intens. Setandardisasi sistem sekolah pembakuan kurikulum, metode pengajaran (dengan mengambil sekolah pemerintahan sebagai model), penerbitan buku teks (karangan tokoh-tokoh kaum muda sendiri) menandai era baru pendidikan agama di Minangkabau. Selanjutnya,

---

<sup>52</sup> Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di In donesia...*, p. 116.

pembaruan sistem pendidikan agama, ditambah perubahan ekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial juga mengubah watak dasar *orangsiak* dan *surau*. *Orangsiak* yang pada masa kejayaan *surau* belajar agama dari satu *surau* ke *surau* lain dengan biaya yang diperoleh dari sedekah umat, kini terpaksa menjadi murid madrasah modern atas biaya keluarganya. Perubahan ini berarti pecahnya integrasi *orangsiak* *surau* dengan masyarakat, karena sebelumnya terjalin hubungan saling membutuhkan antara keduanya. *Orangsiak* membutuhkan biaya bantuan biaya masyarakat, sementara yang terakhir ini memerlukan *orangsiak* untuk mengajarkan agama, menjalankan upacara keagamaan di *nagari*, dan kembali ke kampungnya untuk menjadi guru agama setelah menyelesaikan pelajaran di *surau*.<sup>53</sup>

Perubahan mendasar lainnya adalah menyangkut kepemilikan lembaga pendidikan. Jika *surau* dimiliki pendiri dan anak cucunya, maka madrasah oleh lembaga-lembaga yang mempunyai sistem manajemen karena diatur birokrasi organisasi. *Surau-surau* besar yang kebanyakannya didirikan sebelum abad ke-20 mulai menghadapi masalah serius, ketika sistem pendidikan Islam dimodernisasi sedang mengalami krisis kepemimpinan, karena banyak pendirinya telah wafat sementara regenerasi kepemimpinan kepada anak sang pendiri tak dapat berjalan lancar. Akibat krisis kepemimpinan, banyak *surau* ditutup atau kurang fungsinya menjadi sekedar tempat belajar mengaji. Sebagian *surau* lagi untuk meneruskan kelangsungan hidupnya terpaksa berafiliasi dengan organisasi Islam tertentu yang menyelenggarakan pendidikan Islam. Dan ini mengandung konsekuensi bagi sistem pendidikan *surau*; yaitu perubahan sistem kependidikannya, sehingga watak asli kependidikan *surau* itu sendiri nyaris lenyap.<sup>54</sup>

Sementara itu, Kaum Ulama tradisional yang terus menerus terancam ekspansi sistem pendidikan kaum muda yang berusaha menyatukan langkah. Akan tetapi,

---

<sup>53</sup> Ash Siddiqeqy, TM Hasbi, *Sejarah pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1961), p. 15.

<sup>54</sup> Ash Siddiqeqy, TM Hasbi, *Sejarah pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam...*, p. 16.

kesepakatan yang diharapkan mampu mempertahankan eksistensi sistem pendidikan surau ternyata menghasilkan lain. Rapat besar kaum Ulama tradisional yang diselenggarakan di Parabek Bukittinggi pada 5 Mei 1930 menghasilkan keputusan untuk membentuk Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Keputusan lain yang cukup krusial bagi sistem pendidikan surau adalah bahwa lembaga pendidikan Islam yang tergabung dalam ke dalam PERTI harus di modernisasi mengikut pola yang dikembangkan Kaum Muda. Dengan demikian, terlihat jelas, Kaum Ulama tradisional tidak punya alternatif lain menyelamatkan sistem pendidikan surau, kecuali merombaknya seperti yang dilakukan Kaum Muda. Perkembangan ekonomi yang membuka berbagai lapangan kerja baru, turut pula memperkecil pamor surau. Surau tidak mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang bernilai ekonomis dalam system ekonomi modern. Surau juga tidak mengeluarkan *ijazah* bagi *orangsiak* sebagai bukti kompetensinya dalam bidang tertentu, katakanlah sedikitnya sebagai guru agama. Akibatnya, Sumatera Thawalib sekedar contoh yang mengeluarkan ijazah lebih menarik, karena ijazah itu sekurang-kurangnya berlaku untuk menjadi guru baik di sekolah negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi dan modernisasi dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya proses “sekulerisasi” lembaga pendidikan Islam Kaum Muda. Sebagian besar kemudian berubah menjadi sekolah umum dengan kurikulum umum yang paling dominan, dan sebagian lagi berusaha mempertahankan identitasnya sebagai sekolah Islam dengan mempertahankan cukup banyak mata pelajaran keIslaman di dalam kurikulumnya.<sup>55</sup>

Sementara itu, surau-surau Kaum Ulama tradisional yang telah di modernisasi berusaha tetap bertahan, meskipun dari hari ke hari terus menyusut. Menurut daftar rekapitulasi pondok pesantren se-Indonesia Departemen Agama RI pada 1982 tercatat 57 pondok pesantren di Sumatera Barat dengan jumlah santri 10.803 orang. Pada tahun pelajaran 2007/2008, angka pesantren di Sumatera Barat menjadi 88 pesantren salafiyah dan

---

<sup>55</sup> Ash Siddiqeqy, TM Hasbi, *Sejarah pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam...*, p. 17.

64 pesantren ashriyah, dan 123 kombinasi kedua tipe. Adapun jumlah santrinya 36.049 orang dengan rincian 19.861 santri laki-laki dan 16.188 santri perempuan.

## **B. Kondisi PERTI pada Masa Kepemimpinan M Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau**

Perkembangan pendidikan Islam dari sistem yang sederhana sampai kepada sistem klasikal di Minangkabau ditanadai dengan banyak putra-putra Minangkabau pergi ke Mekkah dan menetap untuk belajar beberapa tahun disana. Kepergian putra-putra Minangkabau tersebut sekitar tahun 1800-an. Sambil melaksanakan haji mereka tinggal beberapa tahun belajar agama. Berebeda dengan zaman sekarang, kalau pergi ke Mekkah melaksanakan haji hanya beberapa minggu saja, tidak boleh menetap di sana kecuali kalau sengaja untuk belajar. Sekembali mereka dari Mekkah, mereka banyak yang mendirikan lembaga pendidikan pada tahun 1800-an. Mereka yang mendirikan lembaga itu antara lain adalah:<sup>56</sup>

1. Syekh Muhd. Thaib Umar di Sungyang, Batusangkar ( lahir 1291=H-wafat 1338 H=1874 M-1920 M).
2. Syekh H. Abdullah ahmad di Padang, (lahir 1878 M-1933 M).
3. Syekh H. Abdullah Karim amrullah di Maninjau, (1879 M-1945).
4. Syekh H.M. Jamil Jambek di Bukittinggi ( 1860 M-1947 M)
5. Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli di Canduang Bukittinggi ( 1870-1970 M).
6. Syekh H. Ibrahim Musa di Parabek Bukittinggi.
7. Syekh H. jamil di Jaho Padang panjang.
8. Syekh H. Abbas Abdullah di Padang Japang Payakumbuh dan saudaranya Syekh H. Mustafa Abdullah.
9. Syekh H. Abdul Wahid di Tabek Gandang payakumbuh.
10. Syekh H.M. Sa'ad di Mungkar Payakumbuh.

---

<sup>56</sup> Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979, Cet), p. 218.

Di antara putra-putra Minangkabau yang telah berjasa merintis dan mendirikan Islam yang semula sistem surau berubah menjadi madrasah adalah Syekh Sulaiman ar-Rasuli. Ia dilahirkan tanggal 10 desember 1871 M di Canduang IV Angkek, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Ayahnya bernama Angku Mudo Muhammad Rasul, seorang ulama terkemuka di daerahnya dan ibunya bernama Siti Buli'ah. Pada tahun 1904 M Syekh Suliaman ar-Rasuli pergi ke Mekkah dan belajar disana selama kurang lebih kurang tahun 3 tahun dengan ulama terkemuka antara lain dengan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabauwy, Syekh Sayid Babasil dan Mufti Syafi'I Mekkah. Setelah kembali pada tahun 1907, ia melahirkan dan memimpin “*Surau Baru*”. Lembaga pendidikan Islam sebelum tahun 1990-an masih sistem surau dengan tidak berkelas-kelas dan tidak pula memakai bangku, meja dan papan tulis hanya duduk bersela saja. Begitulah sistem surau-suru tempat belajar yang diselenggarakan oleh putra-putra Minangkabau sebelum tahun 1900-an, keadaan ini mungkin di pengaruhi sistem belajar mereka waktu di Madjid al-Haram Mekkah dahulu.<sup>57</sup>

Mulai tahun 1909-1930 sistem surau berubah menjadi kelas, pakai bangku dan pakai papan tulis, termasuk surau Syekh Sulaiman ar-Rasuli *Surau Baru* di Canduang agama Bukittinggi. Beliau selain menjadi guru pada surau itu, juga berdakwah ke masjid-masjid dengan materi dakwah: “*memberantas kepercayaan syirik, khurafat, takhyul, dan memebantah aliran thariqat yang bercampur sihir*”. Dan materi dakwah yang disampaikan di masjid-masjid dan nagari-nagari oleh “*Inyiak Canduang*” waktu itu masih murni ajaran yang beliau terima ketika belajar di Mekkah. Materi dakwah tidak menyinggung (*di modifikasi materinya untuk melawan*) “**Penjajahan Belanda**”. Selain itu, aliran Syafi'I memang sangat berpengaruh sekali pada beliau, pada umumnya ajarannya yang suka damai, dalam arti tidak ekstrem seperti paham wahabi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Darul Makmur, Naskah tentang Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli, ditulis tanggal 24 Juli 2007, dan lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/syekh\\_sulaiman\\_ar-Rusully](http://id.wikipedia.org/wiki/syekh_sulaiman_ar-Rusully).

<sup>58</sup> Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia...*, p. 18.

Sekembali dari Mekkah pada tahun 1907, H. Sulaiman ar-Rasuli ikut mendirikan “*ittihad al-ulama*”, yaitu Persatuan Ulama Sumatera (PUS), yang gagasan perkumpulan tersebut disalurkan melalui majalah “*Al-radd wa al-Mardud*”. Selain PUS itu ada lagi perkumpulan ulama yaitu Persatuan Guru-Guru Islam (PGAI) yang didirikan oleh Kaum Muda yang berpaham modern. PGAI didirikan oleh Kaum Muda tahun 1918 mempunyai cita-cita untuk memajukan pendidikan Islam dan mengangkat derajat guru-guru agama. Pada tahun 1924, PGAI telah membeli tanah yang luasnya kurang lebih 5 hektar untuk cita-cita tersebut. Pada tahun 1930 PGAI mendirikan gedung sekolah Normal Islam serta asramanya. Pada tanggal 1 April 1931 PGAI telah membuka Normal Islam (Kuliah Mu’alimin Islamiah).

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kondisi Kondisi PERTI pada masa kepemimpinan M Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau semenjak 1900-an sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1950-an adalah:

#### **a. Faktor Manusia**

Manusia adalah makhluk yang selalu ingin mencari sesuatu hal, praktis dirasakan manfaatnya, dan mudah mendapatkannya. Di dalam al-Qur’an *surat at-tiin* ayat 4 telah dijelaskan siapa manusia itu secara umum yaitu: “*sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. Potensi untuk maju hanya dimiliki oleh manusia. Hal ini juga sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu, manusia suka mengimitasi dan meniru orang lain. Karena itu pendidikan adalah sarana yang dikelola oleh manusia dan yang dikelola manusia pula, maka wajar mengalami perubahan-perubahan yang tujuannya untuk kesempurnaan dan kebaikan. Begitu tujuan-tujuan perubahan atau model pendidikan cara ideal meskipun hasilnya belum tentu seperti yang diharapkan.<sup>59</sup>

#### **b. Kondisi Masyarakat (Sosio Cultural dan Religious)**

---

<sup>59</sup> Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979, Cet.2), p. 9.

Pada abad ke 17 seorang alim di aceh bernama Ahmad Kusasi, ia telah menuntut ilmu tareqat dengan tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Madinah, sekembalinya di aceh ia mengembangkan ilmu itu, setelah itu dating pula ke Aceh Syekh Abdurrauf dan menegmbangkan ilmu tareqat pula di aceh. Akhirnya Syekh Ahmad Kusasi pindah ke Palembang karena ilmu tareqat Kusasi tidak diterima oleh masyarakat Aceh.

Pada masa Abdurrauf di aceh itulah burhanuddin pergi melanjutkan menuntut ilmu lebih kurang 10 tahun disana dan kembali ke Minangkabau. Syekh Burhanuddin pun mengembangkan ilmu Islam dan mendirikan surau di Ulakan. Selanjutnya perkembangan model pendidikan Islam berkemabang bukan di daerah pesisir saja, akan tetapi ke darat. Selain itu, terjadi pula hubungan Minangkabau dengan Timur tengah melalui melaksanakan Ibadah Haji, melalui itu mulai terjadi pengemabngan paham agama Islam sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Syekh masing-masing. Pada prinsipnya warna pendidikan sebelum kemerdekaan tergantung Kiyainya.<sup>60</sup>

Corak keyakinan masyarakat di Minangkabau saat itu pun berbeda-beda, mulanya menyampaikan ajaran Islam di Minangkabau sangat mudah, cukup masyarakat hanya memahami rukun iman dan rukun Islam. Dalam pemahaman itu masih ada yang tercampur dengan syirik, khurafat, bid'ah, dan lain-lain. Sementara itu, orang yang berangkat ke Mekkah silih berganti pula dan mereka banyak juga yang menuntut ilmu Islam disana bukan sekedar ibadah Haji saja. Selain itu perubahan pemerintahan di Mekkah pun terjadi, sehingga paham-paham ajaran Islam itu pun terjadi perubahan pula antara lain paham Wahabi. Akibat yang demikian membawa perubahan-perubahan dalam masyarakat di Mianangkabau pula. Perubahan itu ada yang bersifat revolusioner dan ada melalui evolusioner.

### **c. Masa Perubahan (1900-1908)**

---

<sup>60</sup> Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia...*, p. 97.



Banyak pelajar-pelajar dan guru-gurunya agama di Minangkabau pergi naik haji ke Mekkah, serta bermukim disana melanjutkan pelajaran bertahun-tahun lamanya. Sekembali dari sana mereka ajarkanlah ilmu Agama dan bahasa arab yang mereka pelajari itu. Dengan jalan demikian bertambah tinggilah mutu ilmu agama di Indonesia, termasuk di Minangkabau.

Dengan demikian, susunan pendidikan Islam makin mengalami perubahan, semula yang dipelajari baca Al-qur'an akhirnya ada belajar kitab, seterusnya berkembanglah pendidikan Islam. Sementara itu pendidikan Belanda juga sudah berkembang akan tetapi untuk golongan tertentu. Kompetitif dalam bidang pendidikan pada akhirnya membawa kemajuan bagi masyarakat. Hal ini seperti yang diprakarsai angkatan pembaru oleh Abdullah Ahmad tahun 1909 dengan Adabiyahnya, H.M. Thaib Umar di Sungayang.<sup>61</sup>

#### **d. Paham PERTI**

Kemunculan Persatuan ulama yang berpaham Ahlul-sunnah Wal-Jama'ah al-Syafi'i terinspirasi dari gerakan pembaruan bidang pendidikan seperti gerakan Abdullah Ahmad dengan kawan-kawannya. Selain demikian paham yang dianut orang pedesaan pada umumnya Syafi'iah, karena itu dengan munculnya gagasan Syekh Sulaiman ar-Rasuli bersama kawan-kawannya mendirikan PERTI untuk mengayomi sekolah-sekolah yang berpaham Syafi'iah dan pada umum milik keluarga mendapat dukungan oleh masyarakat pedesaan.

Munculnya paham pembaruan inilah yang menjadikan salah satu inspirasi berdirinya *Persatuan Tarbiyah Islamiyah oleh ulama-ulama yang mengatakan bahwa mereka berpaham Ahlul-sunnah Wal-jama'ah*. Perlombaan akhirnya membawa Minangkabau maju terutama dalam perkembangan pendidikan agama.

Syekh Sulaiman ar-Rasuli sebagai ketua Pus membuka jalan baginya untuk mempertemukan ulama-ulama yang berpaham "ahlul-sunnah Wal-Jama'ah", bermazhab imam Syafi'i. pada

---

<sup>61</sup> KOMPAS, dengan judul "Syekh Soelaiman ar-Rasoeli Berjuang Dari Desa, Mendirikan MTI dan Perti", terbitan Kamis, 24-8-1995

tanggal 5 Mei 1930 M bertempat di Canduang, Bukittinggi pada saat itu masih disebut Sumatera Tengah. Ia berhasil mendorong ulama-ulama yang berpaham mazhab Imam Syafi'i membuat suatu wadah sebagai peningkatan ukhuwah Islamiyah yaitu Perastuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).<sup>62</sup>

Ulama-ulama yang ikut dalam pembentukan PERTI tersebut anatar lain :

1. Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Canduang Bukittinggi.
2. Syekh M. Jamil Jaho, Padang Panjang.
3. Syekh Abbas Ladang Laweh, Bukittinggi.
4. Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang, Suliki.
5. Syekh M. Arifin Batuhampar.
6. Syekh Khatib Ali, Padang.
7. Syekh Makhudum, Solok.
8. Syekh M. Yunus Sasak, Pasaman.

Dalam pertemuan itu melahirkan kesepakatan antara lain:

1. Meningkatkan pendidikan di suaru masing-masing menjadi pendidikan persekolahan yang disebut Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI).
2. Mendirikan organisasi dari amdrasah-madrasah tersebut yang diberi nama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).

Organisasi yang didirikan tahun 1930 ini masih eksis sampai pada zaman kemerdekaan sebagai lembaga pendidikan Islam di Minangkabau dan sampai zaman reformasi ini, meskipun lembaga pendidikan Madrasah tarbiyah Islamiyah (MTI) ada kemunduran dari jumlah murid-muridnya dan dalam aspek-aspeknya. Setelah pertemuan tanggal 5 Mei 1930 itu, berdirilah sekolah-sekolah yang bersifat klasikal. Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang pertama adalah di Canduang Bukittinggi yang didirikan Syekh Sulaiman ar-Rasuli

---

<sup>62</sup> KOMPAS, dengan judul " Syekh Soelaiman ar-Rasoeli Berjuang Dari Desa, Mendirikan MTI dan Perti" ...,

tanggal 5 Mei 1930, kemudian diikuti oleh MTI Jaho padang Panjang yang dipimpin oleh Buya H.M. Jamil, selanjutnya MTI tabek Gadang, payakumbuh yang dipimpin oleh Abdul Wahid Shaleh.<sup>63</sup>

Dalam versi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, dijelaskan lebih rinci perkembangan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) diseluruh Minangkabau sebagai berikut:

- 1) Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, Bukittinggi didirikan pada tahun 1907. Sebelum lahirnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah oleh Sulaiman ar-Rasuli.
- 2) Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Tabek Gadang. Didirikan pada tahun 1906 oleh Syekh Abdul Wahid.
- 3) Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho, Padang panjang didirikan oleh Syekh M.Jamil.
- 4) Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batuhampar. Didirikan pada tahun 1.000nsebagai perguruan Al-Quran yang termasyhur di Minangkabau.

Catatan berdirinya 4 madrasah di atas adalah sebelum pertemuan ulama-ulama PERTI pada tanggal 5 Mei 1930. Akan tetapi, setelah pertemuan itu, banyaklah sekolah Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang muncul. Secara genetif Madrasah tarbiyah Islamiyah berkembang pesat tumbuh di Sumatera Barat, karena murid-murid Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang telah tersebar ke seluruh pondok Sumatera bahkan ke daerah-daerah lain, begitu juga murid-murid dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) lainnya.<sup>64</sup>

Di dalam KOMPAS terbitan 1995 dan begitu juga menurut catatan Darul Makmur, Jumlah MTI sampai saat itu seluruh Sumatera Barat, termasuk di Indonesia berjumlah 300 Madrasah, sedangkan berdasarkan data Internet <http://id.wikipedia.org>. Sebanyak 216 Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Perbedaan jumlah madrasah ini tidak jadi prinsip.

---

<sup>63</sup> Darul Makmur, Naskah tentang Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli, ditulis tanggal 24 Juli 2007, dan lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/syekh\\_sulaiman\\_ar-Rusully](http://id.wikipedia.org/wiki/syekh_sulaiman_ar-Rusully), p. 4.

<sup>64</sup> Darul Makmur, Naskah tentang Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli, ditulis tanggal 24 Juli 2007, p. 4.

Salah satu genetif dari perkembangan MTI Canduang di Sumatera Barat dan sebagai alumni MTI adalah Buya H.Umar Bakry, seorang putra Padang Panjang Pariangan Tanah Datar. Beliau telah mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Nagari Padang Panjang Pariangan Tanah Datar dan pendiri Sekolah Tinggi Agama Islam al-Hikmah.

#### **e. Kurikulum MTI**

Secara sentralisasi dari pimpinan pusat Perti baik dari Jakarta ataupun dari Canduang, Bukittinggi tidak ada mengatur Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang telah berkembang di Indonesia dan di Sumatera Barat.

##### 1) Syarat untuk masuk MTI :

- Tamat SD atau Sederajat.
  - Pandai baca/tulis Arab/Al-Qur'an.
  - Pakaian /Customer: Laki-laki Pakai celana panjang dan pakai kopiah. Dan perempuan pakai Mudhawarah/tudung lilit dan pakai kodek/kain panjang.
  - Belajar dalam lokal pria/wanita diantaranya ada kain pembatas .
- Selain belajar disekolah pagi sampai siang hari, malam hari nya ada tempat tutor (mengulang kaji) bagi santri pada rumah guru tertentu.<sup>65</sup>

##### 2) Materi Pelajaran :

- Kelas satu belajar; Kitab Nahu Matan Jurmiyah, Syarf Matan Bina, Fiqh Matan Taqrib, dan akhlak Wasatul al-bana.
- Kelas dua belajar; kitab Nahu Mukhtasar, Syarf Kailani.
- Kelas tiga, empat, lima, enam, tujuh; Kitab Fath al-Qorib, Tahtazani, Kifayatu Awam, Minhajjuul abiding, Bidayatul Mujtahid, Jalalain, Khazen, husnul Hamidiyah, Mahalli, Thafah, Matan alfiyah.

##### 3) Materi Tambahan :

---

<sup>65</sup> Samsul, Nizar, *Seabad Buya Hamka, memeperbincangkan Dinamika Intelektual dan pemikiran Hamka tentang pendiidkan Islam*, (Jakarta:kencana, 2008, Cet 1), p. 116.

- Muzakarah/debat tentang pelajaran, terutama Qawaid dalam baca Matan.
  - Muhadharah/latihan pidato.
  - Pengetahuan Umum (diajarkan setelah tahun 70-an).
  - Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris (diajarkan setelah tahun 70-an).
- 4) Cara belajar, sebelum melanjutkan pelajaran baru ada siswa mengeluarkan kehasilan (yang sudah dihafalnya).<sup>66</sup>
  - 5) Khusus bagi kelas tujuh ada pelajaran khusus; tareqat/tasawuf.

### **C. Pengaruh M Sulaiman Ar-Rasuli terhadap PERTI di Minangkabau**

Dari latar belakang kemunculan Perti di Minangkabau semenjak tahun 1928 perkembangan selanjutnya cukup menggembirakan yaitu dengan berubahnya sistem pendidikan surau menjadi madrasah. Bahkan jumlah Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang diorganisir dalam wadah Perti berkembang dengan baik. Pendidikan yang bernaung di bawah Perti yang bertujuan secara filosofis sama dengan tujuan pendidikan yang telah diperbaharui kaum reformis, bahkan sampai sekarang tujuan pendidikan Perti itu masih relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan itu seperti yang dikemukakan oleh Samsul Nizar, yaitu untuk membentuk al-ihsan al-kamil atau manusia paripurna. Maka setidaknya pendidikan Islam segoyanya diarahkan pada dua dimensi, yaitu pertama, dialektika horizontal terhadap sesamanya. Kedua, dimensi ketundukan vertikal kepada Allah SWT.

Namun jika dibandingkan dengan Perserikatan Muhamadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M. perti tidak begitu pesat perkembangannya. Hal ini walaupun sama-sama dalam keadaan zaman menuju

---

<sup>66</sup> Samsul, Nizar, *Seabad Buya Hamka, memeperbincangkan Dinamika Intelektual dan pemikiran Hamka tentang pendidikan Islam...*, p. 116.

pergerakan untuk kemerdekaan RI, akan tetapi keberadaan kedua organisasi itu dari perkembangannya jauh berebeda.<sup>67</sup>

K.H Ahamd Dahlan bergabung dengan Boedi Oetomo dan kawan-kawannya yang mendunia sifatnya, sedangkan Syekh Sulaiman ar-Rasuli bergabung dengan ulama-ulama daerah atau lokal saja. Karena itu, Perti lahir di Sumatera Barat tidak meluas sampai ke Yogyakarta. Adapun Perserikatan Muhamadiyah lahir di Yogyakarta akan tetapi sampai ke Sumatera Barat bahkan besarnya di Sumatera Barat. Dan Perti telah memberikan peranannya sebagaimana organisasi Islam lainnya di dalam Negara republic Indonesia ini sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pendidikan**

Perti telah berkiprah dalam dunia pendidikan bangsa terutama di Minangkabau dengan mereformasi sistem pendidikan surau kepada pendidikan madrasah. Hal ini dapat dilihat dalam catatan sejarah sebelum tahun 1900-an dan sesudahnya. Materi pelajaran pada sekolah-sekolah MTI semenjak sistem surau sampai berubah menjadi madrasah adalah sebagai berikut :

- Nahu matan jurmiyah, mukhtasar, alpiah.
- Sharf; Matan buna, Kailani.
- Matan Taqrib, Fathul Qarib, Mahalli.
- Tafsir; Jalalain, Khazin.
- Hadits; Matan Arba'in, Jawahir Bukhari, Bukhari, Muslim.
- Kifayatul Awam dll.<sup>68</sup>

Ditambah dengan pengetahuan umum dan keterampilan/olahraga hal ini setelah tahun 70-an. Materi materi tersebut pada dasarnya berasal dari Al-Quran dan Hadis dan ilmu alat untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis. Selain demikian ada juga materi yang berkaitan

---

<sup>67</sup> Herry Mohammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad ke-20*, (Jakarta:Gema Insani, 2006, Cet,1), p. 10.

<sup>68</sup> Darul Makmur, Naskah tentang Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli, ditulis tanggal 24,2007, dan lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/syekh\\_sulaiman\\_ar-Rusully](http://id.wikipedia.org/wiki/syekh_sulaiman_ar-Rusully), p. 6.

dengan tasawuf. Tasawuf dan kajian akidah tauhid yang mendalam kadang-kadang melahirkan kajian-kajian batin. Selain itu, banyak juga guru-guru madrasah yang mempunyai ilmu sufi yang mendalam. Dengan demikian murid-muridnya pun ada yang mempunyai kajian-kajian khusus. Begitulah pembekalan MTI terhadap santri-santri semenjak dari sistem pendidikan surau sampai ke madrasah. Karena itu, tidak heran jika banyak alumni-alumni MTI waktu zaman menjelang kemerdekaan dan sesudahnya masih banyak yang membentuk yang membentuk tempat-tempat berkhilafat atau suluk.

Sebagai salah seorang tokoh Perti, secara faktual ada beberapa basis yang dibangun Syekh Sulaiman ar-Rasuli antara lain :

a. Reformasi sistem pendidikan

Halaqah berubah menjadi sistem kelas, proses berdirinya madrasah-madrasah Perti ini dimulai dengan musyawarah antara ulama-ulama yang mengaku sebagai penganut Ahlu al-sunnah wa al-jama'ah pada tanggal 5 Mei 1928. Perubahan ini secara historis dipengaruhi oleh gerakan pembaruan di Minangkabau yang diprakasai oleh Syekh Jamil Jambek, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Abdullah Ahmad.<sup>69</sup>

Tujuan pembaruan bukan membuat ajaran baru tentang ajaran Islam, akan tetapi mengembalikan ajaran Islam seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Karena di Minangkabau zaman sebelum pembaruan, ajaran Islam masih bercampur dengan bid'ah, Khurafat, takhayul, syirik. Syekh Sulaiman ar-Rasuli dengan beberapa ulama Perti pun, bukan berarti pula setuju terhadap bid'ah dan lain-lain, akan tetapi mengikuti paham Syafi'iyah. Pada tanggal 28 Mei 1930 Syekh Sulaiman ar-Rasuli telah mengukuhkan bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang berfungsi sebagai pengelola madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah yang berada di bawah naungan betul-betul berkiprah dalam pendidikan. Namun karena disebabkan gejolak reformasi pada tahun 1946, organisasi ini yang khitahnya

---

<sup>69</sup> Abuddin, Nata, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Grasindo,2001), p. 4.

semula bergerak sebagai organisasi sosial agama dan pendidikan, beralih fungsi menjadi partai politik Perti. Beralihnya fungsi ini di prakarsai oleh K.H. Sirajuddin Abbas murid Syekh Sulaiman ar-Rasuli. Sehingga Perti setelah menjadi partai politik lebih tersiar ke seluruh Indonesia yang dikenal dengan Partai Perti dengan lambing “*Masjid Menara*” Perti dalam sejarah perpolitikan di Indonesia mempunyai andil yang cuup besar dalam memobilisasi rakyat dalam menyukseskan misi revolusi kemerdekaan Indonesia. Namun seiring dengan arus perkembangan zaman dan berbagai pengaruh, perpecahan pun terjadi dalam tubuh Perti adanya perebutan ekuasaan, sehingga pada tanggal 1 Mei 1969 Syekh Sulaiman mengeluarkan Dekrit agar Perti kembali kepada Khitahnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan, dan dakwah.<sup>70</sup>

#### **b. Bidang Masyarakat**

Pada akhirnya menjadi kekuatan dominan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti membentuk lascar muslimin oleh perti dan Hisbullah oleh muhamadiyah, barisan Sabilillah oleh Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM). Pada mulanya atas usul jepang untuk menambah kekuatannya menghadapi perang asia raya. Akhirnya setelah Jepang kalah pembentukan laskar tersebut menjadi amunisi tersendiri bagi perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Negara Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1970 Syekh Sulaiman ar-Rasuli mengembuskan nafas terakhir. Pelanjut Perti dalam arti sebagai Lembaga Pendidikan dan Perti dalam Wadah Parati politik diteruskan generasi-generasi berikutnya.<sup>71</sup>

#### **c. Pemantap paham Ahlu al-sunnah wa al-Jama'ah Syafi'iyah**

di Minangkabau paham ini sangat berpengaruh di Indonesia pada umumnya. Secara umum paham Perti, Nahdatul Ulama, Al-Jami'atul al-Wasilah umumnya hamper sama. Itikad

---

<sup>70</sup> Sismarni, *Perti Dalam sejarah*, (Padang: Hyfa Press, 2006, Cet 1), p. 39.

<sup>71</sup> Sirajuddin Abbas, *I'tiqad ahlussnah wal-jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994 Cet.19), p. 36.



(paham) kaum Ahlu al-Sunnah wa al-jama'ah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, terbagi atas beberapa bagian yaitu tentang :

1. Ketuhanan
2. Malaikat-malaikat
3. Kitab-kitab suci
4. Rasul-rasul hari Akhirat
5. Qadha dan Qadar.

Iktikad yang enam tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya seseorang. Dengan demikian, keterangan di atas berdasarkan hadis riwayat muslim. Ringkasan iktikad ahlusunnah waljamaah juga di jelaskan oleh Siradjuddin Abbas.<sup>72</sup>

d. Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan parti sebagai pembentuk lembaga pendidikan dan sebagai partai politik telah banyak mempunyai andil dalam masyarakat pertama, alumni madrasah tarbiyah Islamiyah banyak yang berkiprah apalagi setelah merdeka atau menjelang pemilihan umum pertama tahun 1951, alumni MTI banyak yang aktif dalam partai bahkan menjadi anggota konstituante seperti Rasuli Abdul Wahid Tabek Gadang Suliki Payakumbuh, Umar Bakry alumni madrasah tarbiyah Canduang Bukit Tinggi dari Tanah Datar, dan lain-lain. Selain itu, banyak juga yang bekerja dalam pemerintahan, terutama dalam lembaga peradilan agama seperti Buya Dt.Manunjun dari Jaho Padang Panjang. Hal ini mungkin karena materi yang dipelajarinya semasa di madrasah dahulu kitab-kitab kuning seperti Mahalli, Thaufah, Bidayatu Al-Mujatahid, dan Baiquni. Kedua, alumninya banyak juga yang mendirikan atau mengisi kegiatan yang bersifat "Uzlah", seperti mendirikan kelompok pengajian, termasuk pengajian suluk dan Tarekat. Biasanya Tungku Khalifah lebih dekat kepada Ualam-ulama

---

<sup>72</sup> Siradjuddin Abbas, *I'tiqad ahlussnah wal-jama'ah...*, p. 37.

atau alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah daripada alumni Thawalib atau Muallimin atau sekolah Muhamadiyah.

Pada hakikatnya Kaum Tua adalah kelompok kaum Muslimin Minangkabau yang dalam bidang akidah menikatkan diri kepada paham *Ahl al-Sunnah wa al-jama'ah* ajaran Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Muslim Al-Maturidi, sedangkan dalam bidang ibadah mengikatkan diri kepada mazhab Syafi'i. sekalipun tidak semuanya menganut dan mengamalkan ajaran tarekat, namun pada prinsipnya mereka mengakui kebenaran tarekat yang di pandang mu'tabarah dan oleh Karena itu mereka merasa terpanggil untuk mempertahankannya. Baik tarekat, maupun mazhab Syafi'i dan Ahl al-sunnah wa al-jamaah, menurut beberapa penulis sejarah, telah menguasai pengajaran Islam Indonesia pada umumnya, Minangkabau khususnya, sejak masuknya Islam ke awasan ini. Melalui beberapa kerajaan yang ada di Nusantara, paham dan system ini telah di jadikan pegangan utama dalam system pemerintahan mereka, terutama yang berkaitan dalam aspek ibadah, munakahat, dan kewarisan. Sistem inilah yang di rasa oleh Kaum Tua sebagai sedang terancam oleh gerakan pembaruan Kaum Muda. Oleh sebab itu pihak yang di sebut pertama merasa wajib mempertahankan dan membentengi paham yang di anggap sudah mapan di kalangan masyarakat.<sup>73</sup>

Kecuali itu, ada beberapa alasan lain Kaum Tua merasa terpanggil untuk melakukan aksi mempertahankannya itu. Alasan-alasan tersebut, antara lain:

1. Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam menurut mazhab Syafi'i dalam Iktikad Ahl al-sunnah wa al-jamaah dan telah berurat berakar di seluruh umat dan masyarakat Indonesia.
2. Mazhab Syafi'i adalah benar dan di akui kebenarannya oleh dunia Islam.

---

<sup>73</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), p. 235.

3. Berpindah dari mazhab Syafi'i yang telah benar kepada mazhab lain, akan mengakibatkan perpecahan dan kekacauan di tengah masyarakat, terutama pada oaring awam.
4. Tetap dalam mazhab Syafi'i berarti memelihara dan mempertahankan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Ukhuwah Islamiyah.

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan ini, sebenarnya ada alasan mendasar lainnya yang lebih mendorong Kaum Tua untuk mempergencar usaha mempertahankan dan mengembangkan mazhab Syafi'i dan *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* di Minangkabau. Alasan itu, menurut Rusli A. Wahid, salah seorang yang ikut membidani lahirnya Perti, adalah untuk membendung arus modernisasi yang menganjurkan umat Islam untuk berijtihad dan langsung mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis tanpa mempergunakan pendapat-pendapat Ulama ahli. Gerakan ini, menurut Rusli berbahaya, karena tidak ada Ulama sekarang yang memenuhi syarat untuk berijtihad seperti di syatkan dalam ilmu Ushul Fikih. Artinya, kalau cara seperti ini di biarkan maka orang akan leluasa melakukan ijtihad, padahal mereka bukanlah ahlinya. Akibatnya, agama Islam akan rusak dan kacau.<sup>74</sup>

Seperti disebut sebelumnya, cara atau metode yang digunakan oleh Kaum Tua untuk mempertahankan pendirian mereka itu, sama dengan apa yang dilakukan oleh pihak Kaum Muda, "lawan" mereka. Artinya, kalau Kaum Muda menerbitkan majalah, maka Kaum Tua pun menerbitkan majalah. Bila Kaum Muda melancarkan serangan melalui tabligh di surau-surau dan lain sebagainya, Kaum Tua pun membalas dengan model dan wadah yang sama. Melalui surau dan halaqah-halaqah yang mereka punyai, Kaum Tua senantiasa membina jamaahna dan membentengi mereka dari informasi modernisasi Kaum Muda yang mereka

---

<sup>74</sup> Rusli A. wahid, *Kepertian*, DPP Perti, (Jakarta 1985), p. 4-5.

anggap berbahaya terhadap keutuhan agama serta ketentraman umat dan masyarakat. Semakin gencar serangan yang mereka pula balasan yang mereka kirim.<sup>75</sup>

Satu hal yang perlu di catat, bahwa ternyata tidak semua ide pembaruan Kaum Muda itu ditolak oleh Kaum Tua. Langkah Kaum Muda mengubah sistem pendidikan surau menjadi madrasah ternyata diserap oleh Kaum Tua. Syekh Abbas, misalnya, salah seorang tokoh sentral Kaum Tua, mendirikan sekolah Arabiyah School di Ladang Lawas, Bukittinggi tahun 1918, dan Islamiyah School di Aur Tajungkang, Bukittinggi, 6 tahun kemudian. Semula, langkah Abbas itu belum mendapat respons dari awan-kawannya sesama Kaum Tua yang masih ingin mempertahankan sistem pendidikan bersurau dan atau berhalaqah. Akan tetapi entah Karena abbas, atau karena gencarnya gerakan Kaum Muda, atau mungkin juga karena keduanya. Langkah Abbas itu merembes juga ke banyak Ulama Kaum Tua tadi. Secara berangsur-angsur mereka mulai melakukan perubahan-perubahan, baik sistem maupun sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan yang mereka kelola. Sekolah yang didirikan oleh Syekh Abbas ini, mirip atau mungkin juga “mengikuti” sekolah Adabiyah School yang didirikan oleh Abdullah ahmad (Kaum Muda) pada tahun 1909 di Padang. Diantara lembaga-lembaga pendidikan mereka yang terbesar adalah :

1. Surau Syekh Khatib Muhammad Ali di Parak Gadang, Padang.
2. Surau Syekh Muhammad Jamil Jaho, Padang Panjang.
3. Surau Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Canduang, Bukittinggi.
4. Surau Syekh Jalaluddin, Sicincin.
5. Surau Syekh Abdul Madjid, Koto Nan Gadang.
6. Surau Arifin Arsyadi, Batu Hampar.
7. Surau Syekh A. Wahid, Tabek Gadang.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Baharuddin ArRasuli, *Sejarah Lengkap Persatuan Tarbiyah Islamiyah*, tahun 1979, p. 3-4.

Tidak hanya di bidang pendidikan, gerakan Kaum Muda membentuk organisasi seperti mendirikan “Perkumpulan Guru Agama Hindia Belanda” pada bulan April 1916 di Padang juga menimbulkan aksi yang sama di bidang di kalangan Kaum Tua. Mereka mendirikan organisasi “tandingan” dengan nama “Ittihad Ulama Minangkabau” pada bulan Juni 1921 dengan maksud yang juga sama dengan kelompok yang disebut pertama, yaitu untuk menghimpun Ulama-ulama dan guru-guru agama di Kalangan Kaum Tua untuk aktifitas Dakwah dan pendidikan. Organisasi ini didirikan atas prakarsa Syekh Abbas Ladang Lawas, Syekh Sulaiman ar-Rasuli, dan lain sebagainya.

Khusus di bidang pendidikan, Kaum Tua mengawali langkah pembaruan mereka dengan surau gerakan yang bermula di Canduang. Langkah tersebut terjadi ketika pada suatu hari di tahun 1926, Syekh sulaiman ar-rsusli (1878-1970) mengajar muridnya di surau baru, Canduang. Kira-kira pukul sepuluh pagi. Sebelum pelajaran di mulai, salah seorang murid seniornya datang menghadap dan menyerahkan sepucuk surat yang ia terima dari Syekh Abbas, Bukittinggi. Menurut Baharuddin Rusli, Putra dari Syekh Sulaiman ar-rususli, surat itu berisi saran Syekh Abbas agar beliau, Syekh Sulaiman ar-Rasuli, bersedia mengubah sistem pengajarannya menjadi madrasah, seperti yang dilakukan oleh Kaum Muda. Selain membaca surat tersebut, Syekh Sulaiman ar-Rasuli, segera memberitahukan murid-muridnya mengenai maksud dari surat itu dan sekaligus meminta tanggapan mereka atas surat yang saran yang diajukan oleh Syekh Abbas. Entah karena yang punya saran itu seorang ulama yang cukup mereka segani, atau mungkin juga karena anak-anak muda Kaum Tua itu mulai terpengaruh oleh gerakan pembaruan Kaum Muda. Saran tersebut disetujui dan mendapat sambutan hangat di kalangan murid-murid Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang hadir dalam

---

<sup>76</sup> Baharuddin ArRasuli, *Sejarah Lengkap Persatuan Tarbiyah Islamiyah...*, p. 4.

pengajian itu, dengan antusias mereka mereka agar sang Buya dapat merealisasikan saran itu dalam waktu yang tidak lama.<sup>77</sup>

Pembicaraan berikutnya dilanjutkan pada malam hari di rumah sang guru. Karena memang sudah ada kesepakatan di siang harinya, pertemuan itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti sehingga didapatkan suatu kesepakatan untuk mengubah sistem pendidikan seperti yang diinginkan. Semula, diusulkan nama “*Tarbiyatuthullab*” untuk nama pendidikan yang baru tersebut. Atas dasar pertimbangan bahwa nama itu seakan-akan meniru lembaga pendidikan Kaum Muda, “Sumatera Thawalib”, maka istilah itu diganti dengan nama “Tarbiyah Islamiyah”. Begitulah, mulai tahun 1926 Syekh Sulaiman ar-Rasuli telah mengambil langkah penting untuk memperbaharui sistem pendidikan di surau baru Canduang yang didirikan tahun 1327 H. (1908). Cara berhalakah di surau diubahnya menjadi berkelas madrasah. Di samping itu, ia juga melengkapi madrasahnyanya dengan berbagai sarana pendidikan modern, seperti meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, langkah Syekh Sulaiman ar-Rasuli ini pun diikuti pula oleh kawan-kawannya sesama Kaum Tua yang memiliki surau tempat pendidikan, seperti Syekh A. Wahid Tabek Gadang di Payakumbuh, Syekh Muhammad Jamil Jaho di Padang Panjang, Syekh Arifin di Batu Hampar, dan lain-lain, sehingga Ranah Minang menjadi semarak oleh tumbuhnya berbagai madrasah.<sup>78</sup>

Melihat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah di Minangkabau sekitar tahun 1926, timbullah hasrat Syekh Sulaiman ar-Rasuli untuk menyatukan ulama-ulama Kaum Tua, terutama para pengelola madrasah, dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia memperkarsai sebuah pertemuan besar di Canduang pada tanggal 5 Mei 1928. Walaupun tidak pernah diresmikan secara formal, organisasi ini ternyata tidak hanya mampu mengilhami lahirnya banyak madrasah Tarbiyah Islamiyah Lainnya, tetapi

---

<sup>77</sup> Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974), p. 31-32.

<sup>78</sup> Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau...*, p. 31-32.

juga telah membuat semakin membuat mekarnya gerakan Kaum Tua di Minangkabau. Murid madrasah bertambah ramai dan jama'ah pengajian semakin semarak. Melihat kenyataan semacam itu, timbulah keinginan berikutnya di kalangan Kaum Tua untuk menjadikan organisasi mereka ini sebagai tidak hanya sekedar mengurus sekolah, melainkan untuk penampung dan mempersatukan segenap ulama tradisional serta beregrak dalam bidang sosial pada umumnya. Keinginan ini diwujudkan dengan melahirkan organisasi baru yang bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam sebuah rapat di Canduang pada tanggal 20 Mei 1930. Organisasi ini di ketahui oleh Sulthain (1906-1988), dan dapat disingkat dengan PTI.<sup>79</sup>

Pada tahun 1931, Syekh Sulaiman ar-Rasuli mendapat anugerah bintang perak besar (*Grote Zilvern Ster*) dari pemerintahan Hindia Belanda. Penganugerahan ini dimaksudkan untuk menghargai jasa beliau mewujudkan kerja sama yang harmonis antara Ulama dan kaum adat. Bagaimana, pun peristiwa ini dianggap oleh kalangan Tarbiyah sebagai rahmat yang patut di rayakan. Maka, sebuah rapat besar sengaja di adakan di Batu Hampar Payakumbuh. Tidak hanya sekedar ungkapan rasa syukur, pertemuan ini juga di dimanfaatkan untuk lebih membenahi organisasi mereka yang masih muda. Salah satu bentuk pembenahan itu adalah pengalihan jabatan ketua dari Sulta'in kepada Syekh Abdul madjid Koto Nan Gadang, dan jabatan sekretaris dari Gazali P.Tanjung kepada Syahrudin Marajo dunia. Setahun sesudah rapat besar DI Batu Hampar, Perasatuan tarbiyah Islamiyah mengadakan kongres yang pertama di Koto Nan Ampek Payakumbuh. Dalam kongres ini tercetuslah gagasan untuk menukar nama organisasi menjadi Persatuan Islam Indonesia. Gagasan ini berasal dari peserta kongres maka ia dijadikan sebagai salah satu keputusan kongres. Pada prinsipnya, Ualama-ulama Tua Tarbiyah Islamiyah tidak keberatan dengan hasil keputusan tersebut. Hanya khawatir bila nama yang menonjolkan sikap nasionalisme itu akan memandang kecurigaan Belanda, mereka mengusulkan agar keputusan tersebut di

---

<sup>79</sup> Rusli A. wahid, *Kepertian*, DPP Perti, (Jakarta 1985), p.2.

batalkan saja. Usul ini di tolak oleh angkatan Muda yang memang mendominasi jumlah peserta kongres, kelompok yang disebut terakhir ini berpendapat bahwa hal itu adalah keputusan kongres yang tidak bisa di batalkan begitu saja. Bagaimanapun, keputusan ini mesti dihormati, dan oleh karenanya harus dipertahankan. Sikap generasi muda yang dianggap “keras kepala” ini menimbulkan amanah besar yang disebut pertama. Mereka menyampingkan hasil kongres tersebut, dan organisasi pun dikuasai sepenuhnya. Peristiwa ini menurut Baharuddin Arrasuli, menimbulkan disharmoni antara yang tua dan yang muda. Inilah masa stagnasi pertama dalam perjalanan sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan berlangsung sampai tahun 1934.<sup>80</sup>

Menurut Baharuddin, stagnasi yang terjadi itu hanya berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas organisasi, dan sama sekali bukan terhadap aktivitas belajar mengajar di Madrasahserta tabligh di kelompok-kelompok pengajian yang mereka kelola. Masa ini juga sering digunakan oleh Ulama-ulama Tua tersebut untuk pertemuan rutin setiap bulan, mengaji atau bermuzakarah tentang berbagai masalah keagamaan. Pertemuan ini, sebenarnya pernah pula mereka gunakan untuk menunjuk H. Hasan Basri, seorang Ualam senior, untuk menjadi ketua organisasi, namun, karena kondisi fisiknya yang tidak mengizinkan, jabatn itu diserahkan kembali kepada Ulama tersebut.<sup>81</sup>

Kasus stagnasi ini member kesan tentang beberapa dominannya peran generasi tua dalam tubuh Perti. Ini adalah kasus pertama terjadinya pertentangan khendak antara yang tua dan yang muda di kalangan organisasi Kaum Tua ini. Adalah manusiawi kalau antara satu individu dengan individu lain, atau antara satu kelompok dengan satu kelompok lain, terdapat perbedaan khendak dan pandangan. Dan masih alamiah bila antara yang tua dan yang muda berbeda selera. Naumn, akan menjadi “aneh” bila dalam perbedaan-perbedaan itu ada pihak yang memaksakan kekhendaknya kepada pihak lain. Ia bisa melahirkan konflik, yang bisa

---

<sup>80</sup> Baharuddin ArRasuli, *Sejarah Lengkap Persatuan Tarbiyah Islamiyah*, tahun 1979, p.11-12.

<sup>81</sup> Baharuddin ArRasuli, *Sejarah Lengkap Persatuan Tarbiyah Islamiyah...*, p.11-12.



terbuka dan frontal, juga bisa terselubung dan tersembunyi “ketokohan” salah satu pihak yang mengatasi lainnya. Kelihatannya hal yang disebut terakhir ini terdapat organisasi yang sedang di jelaskan. Generasi muda, walau merasa benar dan bertindak atas dasar hukum yang jelas (hasil kongres), tetapi karena segan kepada yang tua, terpaksa menahan diri. Akibatnya terjadilah peristiwa yang tua melakukan klaim terhadap aktivitas organisasi ini. Hal ini terutama terlihat ketika hal tahun 1935 mereka memanggil seluruh pengurus dan penasihat untuk mengadakan rapat lengkap di Canduang. Dalam rapat ini mereka menunjuk H. Siradjudin Abbas, lahir di Bengkawas Bukittinggi, 5 Mei 1905, untuk memangku jabatan ketua pengurus besar Tarbiyah. Rapat ini juga menyusun formasi baru kepengurusan sebagai berikut:

Ketua Kehormatan : Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang

Ketua Pengurus Besar: H. Siradjuddin Abbas

Mudir Ma'arif : Syekh Sulaiman ar-Rasuli

Ketua Majlis Tarjih : Syekh Muhammad Abbas

Ketua Bidang Tarekat : Syekh A. Wahid Salehi dan Syekh arifin Arsyadi

Bendahara : HMS. Sulaman

Dalam masa kepengurusan ini berhasil diterbitkan majalah soerati dan disusunnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disahkan dalam konferensi tanggal 11-16 Februari 1935 (10-13 Zulhijah1956) di Bukittinggi. Kalau sebelumnya organisasi ini di singkat PTI, maka dalam Anggaran Dasar yang baru disahkan ini di singkat dengan PERTI.

Pada pokoknya Anggaran dasar itu memuat nama, tempat, asas, tujuan dan upaya organisasi Perti. Di situ disebutkan bahwa organisasi ini bernama Perti, kedudukan berpusat di Bukittinggi. Berasaskan Islam, dan bertujuan :

1. Berusaha memajukan pelajaran, pendidikan Agama Islam dan yang bersangkutan dengan itu.
2. Menyiarkan dan mempertahankan Agama Islam dari segala serangan.
3. Berdaya upaya memajukan perusahaan.
4. Memperkokoh amal ibadah serta memperbanyak syiarnya.<sup>82</sup>

Bila ketentuan ini dapat ditemui di pasal 4, Maka pada pasal 5 ditentukan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu diadakan ikhtiar yang tidak berlawanan dengan ketentuan umum, serta berbimbing tangan dengan adat yang baik di setiap Negeri. Rumusan Anggaran Dasar ini disempurnakan dan disahkan kembali dalam Kongres II pada tanggal 3-5 April 1935 di Bukittinggi, dalam kongres ini diputuskan bahwa nama dan tempat kedudukan organisasi tetap seperti diputuskan dalam konferensi terdahulu, sedangkan asasnya dilengkapi dengan dengan “dalam itikad menurut paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan dalam syariat menurut mazhab Syafi'i”. Disamping itu, tujuan organisasi pun lebih dijelaskan sebagai berikut :

1. Berusaha memajukan pengajaran Agama Islam dan memperbaiki sekolah-sekolah agama bagi bangsa bumi putra seluruhnya.
2. Memperkuat dan memperkukuh “adat dan kawi, syara' dan Lazim” dalam setiap Negeri.
3. Memperhatikan kepentingan Ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah.
4. Memperkukuh silaturahmi antara sesama Negara.
5. Mempertahankan Agama Islam yang suci daris segala serangan.

Adapun jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan ini atas dijelaskan dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga itu:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Rusli A. wahid, *Kepertian*, DPP Perti, (Jakarta 1985), p. 20.

1. Mengadakan sekolah-sekolah Agama dengan nama Tarbiyah Islamiyah.
2. Mengadakan penyiaran Agama Islam dengan Tabligh dan buku-buku.
3. Menerbitkan atau membantu terbit dan tersiarnya buku agama, buku pengetahuan umum dan majalah-majalah.
4. Mengadakan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan.
5. Mengemukakan keperluan-keperluan itu kepada umum kalau dirasa perlu kepada yang berwajib juga.
6. Mengadakan atau memelihara suatu ikhtiar yang berguna bagi kehidupan secara Islam.
7. Melakukan perusahaan berdasarkan keuangan (ekonomi) untuk keselamatan anggota dan perserikatannya.
8. Membangun *studi fonds* untuk mendorong kesengsaraan umum.
9. Memasuki raad-raad pemerintah (menjadi anggota-anggota dewan pemerintah atau perwakilan pemerintah) untuk kepentingan perserikatan dan anggota.<sup>84</sup>

Dalam Anggaran Dasar itu juga disebutkan juga bahwa struktur organisasi Perti terdiri atas pengurus Besar yang didampingi oleh Dewan penasihat (Ulam-ulama Perti yang tua). Dari pengurus besar itu ditunjuk beberapa pengurus besar harian, yaitu ketua, sekretaris, dan Bendahara yang semuanya harus berkedudukan di tempat yang sama. Kemudian, untuk daerah-daerah yang jauh dari kedudukan pengurus besar diadakan Majelis Wakil pengurus besar yang sekurang-kurangnya terdiri atas lima puluh orang dan pimpinannya disebut Konsul Pengurus besar. Majelis inilah yang akan mengoordinir cabang-cabang. Selanjutnya setiap cabang bertugas untuk mengoordinir anak-anak cabang. Di samping stuktur yang disebutkan di atas, Perti juga punya dua organisasi penunjang, yaitu Perti Putri yang dapat diridikandisetiap cabang Perti dan Persatuan Murid-murid Tarbiyah Islamiyah (PMTI) yang

---

<sup>83</sup> Rusli A. wahid, *Kepertian*, DPP Perti..., p. 20.

<sup>84</sup> Majalah Soerarti, Nomor 22 tahun 1939, p. 6-16.

dapat didirikan di setiap Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Ada dua hal yang harus dilestarikan oleh Perti. *Pertama*, adat, yakni adat yang tidak bertentangan dengan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. *Kedua*, Islam dalam paham *Ahl als-sunnah* dan Mazhab Imam Syafi'i. perhatian Perti yang besar terhadap kedua hal tersebut, antara lain, terlihat dengan dibuatnya sebuah piagam kerja sama antara mereka dengan Kaum Adat (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau) pada tahun 1939. Bersama Kaum Adat itu pula, beberapa orang tokoh Perti berangkat ke Jakarta dalam rangka "Gerakan Indonesia Berpalemen" yang dikenal dengan "Komisi Visman".<sup>85</sup>

Disamping itu juga menjalin kerja sama dengan Jamiatul Washliyah, suatu organisasi kelompok tradisionalis Islam di Sumatera Utara. Untuk kerja sama ini dibuat pula piagam "Takatuf" yang berisi bahwa mereka akan bergandeng bahu dalam mempertahankan Islam dengan Paham Sunni dan Mazhab syafi'i dari segala serangan. Mungkin berkat saling pengertian yang di bina kaum adat, dan mungkin juga karena kegigihan mereka mempertahankan paham keagamaan yang telah mengakar, Perti memang pendapat banyak sokongan di kalangan masyarakat Minangkabau. Lembaga-lembaga pendidikannya tumbuh dan berkembang dengan subur, dan organisasinya terus melebr sayap jauh ke daerah-daerah diluar tempat kelahirannya. Tahun 1945, seperti telah disebut di muka, ia telah punya cabang di Kalimantan dan Sulawesi, memiliki 350 lembaga pendidikan dengan berbagai jenjang pendidikan serta punya anggota hamper 400.00 orang. Di samping itu, dalam menata dan menyempurnakan keberadaannya di panggung Islam di Indonesia, Perti pun selalu melakukan pembenahan dan perbaikan sistem keorganisasiannyayang dirasa perlu. Istilah "Kongres", mislanya, yang digunakan dalam pertemuan-pertemuan nasioanal sebelumnya,

---

<sup>85</sup> Ibid

diganti dengan “Muktamar” pada tahun 1941 ketika mereka mengadakan pertemuan semacam itu untuk ketiga kalinya.<sup>86</sup>

Selain untuk paham keagamaan, Perti adalah organisasi yang cukup responsive, dan bahkan cukup terbuka untuk segala macam bentuk pembaruan dalam gerakannya. Seperti terlihat dalam pembahasan sebelumnya, ia tidak saja menerima pembaruan yang ditampilkan Kaum Muda di dalam bidang institusi belajar dalam mengajar, melainkan pula menerap metode dakwah melalui media cetak dan berorganisasi. Hanya saja, sekali lagi, perlu diingat bahwa semuanya itu mereka lakukan untuk mendukung dan selama usaha-usaha itu tidak akan menggeser system anutan dan paham keagamaan yang mereka pertahankan secara Interen, paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang bermazhab Syafi'i. kecendrungan Perti kearah apa yang di sebut diatas, juga terlihat ketika Muhammad Hatta, wakil Presiden RI, mengeluarkan Maklumat tanggal 5 November 1945 tentang pemberian kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mendirikan partai-partai politik. Maklumat ini segera disambut oleh Perti dengan mengadakan rapat pleno pengurus besarnya pada tanggal 22 November 1945. Dalam rapat itu diambil kesepakatan untuk meningkatkan perjuangan oleh Perti dengan cara menjadikannya sebagai partai politik Islam Perti. Keputusan itu di kukuhkan kembali oleh Muktamar IV yang diadakan di Bukittinggi tanggal 24-26 Desember 1945. Pada waktu itu, Muktamar juga mengadakan sedikit perubahan stuktur kepemimpinan, yaitu diangkatnya H. Siradjuddin Abbas yang semula ketua pengurus besar menjadi ketua Dewan partai tertinggi (DPT) dan Rusli A. Wahid menggantikan Siradjuddin sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sedangkan Syekh Sulaiman ar-Rasuli duduk sebagai ketua Majelis penasihat pusat (MPP).<sup>87</sup>

Munculnya Perti menjadi Partai Politik, agaknya karena para tokoh organisasi ini merasa berkepentingan untuk itu. Dengan mengangkat diri sebagai partai Politik, merea

---

<sup>86</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1980), p. 173.

<sup>87</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942...*, p. 173.

merasa semakin kukuh mempertahankan keagamaannya dari semua serangan Kaum modernis, seperti tersebut sebelumnya. Secara moral, keinginan seperti itu memang dapat diwujudkan, dekatnya mereka dengan penguasa pemerintahan, tidak saja membawa dampak rasa aman menjalankan keyakinan dan paham keagamaannya, tetapi juga mampu mengangkat pamor digelanggang perebutan pengaruh dikalangan umat beragama. Namun tidak demikian halnya terhadap gerak langkah mereka melaksanakan cita-cita utama dilahirkannya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kiprah dipanggung politik, membuat mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung menjadikan mereka “jauh” dari Khittah semula. Dua tokoh utama partai, Siradjuddin dan Rusli, diangkat oleh pemerintah Presiden Soekarno sebagai pejabat-pejabat Negara. Sirajuddin ditunjuk sebagai Menteri keselamatan Negara pada tahun 1945. Dua tahun kemudian, Rusli A. Wahid pun diangkat pula sebagai Menteri Negara Urusan Umum dan Irian Barat.<sup>88</sup>

Disamping itu, perubahan status dari organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik, menurut Latief, tentu saja membawa beberapa konsekuensi kepada Perti. *Pertama*, sebagai partai yang bersekala nasional, ia tidak lagi harus terfokus di Sumatera. Perlu melebarkan sayap dan berwawasan nasional. Ia pun perlu berkedudukan di ibu kota Negara sebagai pusat kegiatan politikan dengan sendirinya harus meninggalkan tempat kelahirannya. *Kedua*, Perti harus mampu mempersiapkan tokoh-tokoh politik dan para organisatoris yang andal. Sebab, seperti terlihat pada Sirajuddin dan Rusli, status partai politik yang disandangnya akan memberi peluang bagi tokoh-tokohnya untuk duduk di berbagai sector pemerintahan, legislatif dan eksekutif. Ini berarti bahwa Perti harus mampu membina kader yang dapat dipercaya untuk menduduki posisi tersebut. *Ketiga*, Perti harus mampu memelihara keutuhan dan kekompakan interennya. Karena, terbukanya kesempatan untuk berbagai jabatan itu, jelas akan menimbulkan persaingan yang dapat mengarah kepada

---

<sup>88</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942...*, p. 173.

perpecahan dalam tubuh partai. *Keempat*, Perti harus berhati-hati agar tidak terombang-ambing dalam arus edar kehidupan politik yang sering membingungkan dan bahkan tidak jarang yang tampil “garang” dan akibatnya bisa merugikan organisasi. Sampai tahun 1950, hampir semua hal belum dapat di jamah Perti. Situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan tanah air ketika itu, memanggil partisipasi Perti untuk memikul tanggung jawab bersama dalam perjuangan fisik, sama halnya dengan organisasi-organisasi lain, Perti pun membentuk barisan perjuangannya dengan nama “Lasykar Muslimin” (Lasymi) untuk laki-laki dan “Lasykar Muslimat” untuk perempuan. Diperkiraan, jumlah kedua lasykar itu mencapai angka 10.000 orang. Selain membentuk lasykar untuk menghadapi perjuangan fisik tersebut, Perti mendirikan bengkel senjata pada tahun 1946-1947. Di sana senjata-senjata ringan, seperti senapan dan pistol. Perkembangan selanjutnya dari sejarah kehidupan Perti pascaproklamasi, antara lain ditandai dengan diselenggarakannya Muktamar VI pada tanggal 20-25 Mei 1950 di Bukittinggi. Atas keputusan Muktamar, Dewan Partai Tertinggi yang semula berkedudukan di Bukittinggi dipindahkan ke ibu kota Negara, Jakarta. Kemudian, berdasarkan keputusan Muktamar VIII tanggal 11-16 Agustus 1955, seluruh Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam Perti di pindahkan ke Jakarta. Sejak itu pula Pengurus Besar Perti di Bukittinggi berubah menjadi Dewan Pimpinan Daerah.<sup>89</sup>

Era setelah perpindahan DPP ke Jakarta menunjukkan pelebaran sayap Perti yang cukup pesat. Kawasannya yang dulu terfokus di Sumatera bahkan ada yang mengatakan bahwa Perti adalah Partainya orang Sumatera kini hingga sampai Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lainnya di luar pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1955 itu, ia telah mempunyai 13 Dewan Pengurus Daerah, 75 Dewan Pengurus Cabang, 300 Dewan Pengurus Ana cabang, dan 2.000 Dewan Pengurus Ranting. Dilihat dari segi kualitas anggota, pelebaran sayap serta peran yang di mainkan di pentas pergerakan keagamaan dan

---

<sup>89</sup> *Majalah Suara Hati*, Nomor 1 tanggal 1 Januari 1965, p. 29.

kepolitikan, bahwa Perti mampu meraih kemajuan demi kemajuan yang membuat dirinya bertambah maju. Namun, jika di amati dari segi prospek dan antisipasi masa depan, ternyata organisasi ini belum menunjukkan kesiapan yang representatif. Artinya sampai pertengahan dekade 1950 an itu, Perti masih di dominasi oleh figur-figur senior, dan sama sekali belum terlihat kader, atau tokoh-tokoh baru, baik sebagai pemegang pucuk pimpinan organisasi, apalagi sebagai sosok panutan di teras keulamaan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya generasi baru muncul dalam kepemimpinan Perti. *Pertama*, tertanamnya satu sikap di kalangan pimpinan-pimpinan bahwa Perti adalah organisasi Kaum Ulama yang Notaben sering pula di identtikan dengan kesenioran usia. Sekalipun ada yang berkemampuan di bidang organisasi tetapi tidak tergolong Ulama, tidak akan dapat diterima untuk duduk dalam jajaran kepemimpinan organisasi Perti. *Kedua*, sampai tahun 1950-an ini, Perti menolak mendirikan sekolah-sekolah Umum, dengan alasan bahwa tugas utama mereka hanyalah membina calon-calon Ulama. Mereka juga menolak memasukan pengetahuan umum, seperti, bahasa asing selain Arab, Sejarah, ilmu pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Bahkan adapula yang melarang anak mereka masuk ke perguruan yang lebih tinggi yang didirikan oleh kaum Muda. Konsistensi Perti dalam mempertahankan keberibadiannya jelas terlihat dalam usaha mereka melakukan pembenahan ke dalam. Kesempurnaan alat perlengkapan Partai, seperti Anggaran Dasar, naggaran Rumah Tangga dan organisasi pemudanya, misalnya telah dilaksanakannya secara bertahap. Anggaran Dasar partai yang disusun sejak menjadi Partai Politik bahkan disempurnakan lagi pada Muktamar IX tahun 1962 di Jakarta menunjukkan bahwa keberibadian organisasi ini tetap seperti halnya sebelum menjadi partai politik. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar itu dinyatakan sebagai berikut:



1. Asas Partai ini ialah Agama Islam yang suci, yang dalam itikad dan kepercayaan menganut paham *Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah* (sunni) dan dalam syari'at dan ibadah menurut Mazhab Imam Syafi'i Rahimahullah.
2. Asas partai ini tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Negara, dan programnya tidak bermaksud mengubah asas dan tujuan Negara.

Sedangkan Pasal 3 memuatkan:

- a. Tujuan Partai ialah:
  - 1) Meninggikan Agama Islam dalam arti yang seluas-luasnya.
  - 2) Menjiwai masyarakat Indonesia dalam semangat keIslaman.
  - 3) Membangun masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan keberibadian Indonesia dan Agama Islam.<sup>90</sup>
- b. Partai ini menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat adsara-dasar Negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Dan Keadilan Sosial.
- c. Dalam memperjuangkan tujuannya, Partai ini akan menggunakan jalan-jalan damai dan demokrasi.

Tidak salah lagi, bahwa hal-hal yang disebut Anggaran Dasar diatas adalah pernyataan tegas Perti tentang keberibadiannya yang tetap dan terus dipertahankan, sekalipun telah mengubah diri mrnjadi Partai Politik. Keberibadian itu menyangkut:

1. Paham keagamaan, Sunni dan syafi'i.
2. Paham kenegaraan, penyesuaian diri dengan alam Indonesia merdeka: demokrasi dan pancasila.

Adapula program Partai dimuat dlam pasal 4, yang antara lain menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, Partai ini berusaha:

---

<sup>90</sup> *Majalah Suara Hati...*, p. 29.

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang menjadi jembatan emas untuk kemakmuran rohaniah dan jasmaniah rakyat.
2. Menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya.
3. Memajukan pengajaran, pendidikan, dan kecerdasan rakyat.
4. Mempertahankan rasa cinta terhadap agama, bangsa, dan tanah airnya.
5. Memperhebat penyiaran dan pertahanan agama Islam.
6. Memajukan perekonomian dan kemakmuran rakyat.<sup>91</sup>

Dalam pada hal itu, Perti juga membentuk beberapa organisasi penunjang. Hal ini di cantumkan dalam pasal 7 Anggaran Dasar, yang selengkapnya berbunyi:

1. “Wanita Perti” yang membantu Partai, terutama dalam soal kewanitaan.
2. “Gerbum” (Gerakan Buruh Muslimin Indonesia) yang membantu Partai, terutama dalam soal-soal perburuhan.
3. “Pemuda Islam perti” yang membantu Partai, terutama dalam soal-soal kepemudaan.
4. “Gertami” (Gerakan Tani Muslimin Indonesia) yang membantu Partai, terutama dalam soal-soal pertanian.
5. IPSP (Ikatan pelajar sekolah Perti) yang membantu Partai, terutama dalam soal-soal Pemuda Pelajar.
6. “Germahi” (Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang membantu Partai, terutama dalam soal-soal kemahasiswaan.

Bila di bandingkan dengan Anggaran Dasar sebelumnya, maka butir-butir yang terdapat dalam pasal-pasal setelah menjadi Partai politik, jelas merupakan perubahan dan tambahan dari yang sebelumnya. Perlu dicatat, tambahan ini adalah sebagai salah satu bentuk perkembangan organisasi Perti dari segi keorganisasian dan politik, namun bukan dalam bentuk pemikiran keagamaan.

---

<sup>91</sup> M. Sanusi Latief, *Kaum Tua di Minangkabau*, disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 1988), p. 231.

Kiprah Perti di arena Politik membawanya ke arah berbagai perwajahan. Wajah sosial religius yang semula mendominasi pengabdianya, mulai diwarnai oleh *trend* politik praktis. Wahajahnya yang dulu terkesan spesifikasi kedaerahan, kini setelah hijrah ke ibu kota Negara, muncul sebagai sosok yang berskala nasional. Pada waktu itu, beberapa keberhasilan di gelanggang politik pun dapat diraih. Melalui wakil-wakilnya, ia duduk dalam badan legislatif, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dalam Parlemen Indonesia Serikat (RIS), dan dalam Parlemen hasil pemilu tahun 1955. Selain itu, Perti pun ikut dalam Gerakan Setia Kawan-Kawan Rakyat Asia Afrika dalam konferensi-konferensinya di Bandung, Kolombo, Kairo, dan sebagainya. Sesuai dengan watak yang dimilikinya itu, Perti benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai Kaum Sunni yang anti Konfrontasi dengan sistem yang sedang berlaku. Mereka menginginkan lestarnya suatu nilai yang dirasa baik dan telah diamalkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama. Sebab, dengan cara seperti ini, diharapkan terciptanya harmonisasi yang akan membuat masyarakat merasa aman dan terbebas dari segala gejolak. Dengan cara itu pula, mereka dapat beramal menjalankan syariat agamanya secara baik.<sup>92</sup>

Di satu pihak, sikap anti Konfrontasi terhadap suatu kemapanan memang ada manfaatnya. Ia tidak akan menimbulkan keresahan, dan dengan sendirinya juga tidak akan melahirkan disharmoni. Tapi di lain pihak, ia bisa menciptakan suatu masyarakat statis yang akan menghilangkan dinamika Komunitas manusia. Diciptakannya manusia sebagai makhluk dinamis adalah karena bumi yang akan diurusnya selalu bergerak dengan dinamikanya yang senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan Sunnah Allah. Sinkronisasi antara manusia dan alamnya itu adalah perlu dan amat perlu. Sebab, kesenjangan watak antara keduanya akan membawa akibat fatal, terutama sekali untuk manusia sebagai makhluk “utama” Ciptaan Allah. Itu pulalah sebabnya, Allah menuntut manusia agar selalu melakukan dinamisasi diri,

---

<sup>92</sup> M. Sanusi Latief, *Kaum Tua di Minangkabau*, disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah..., p. 231.

baik melalui penalaran akal intelektual maupun melalui *Zauq*, rasa yang ada dalam dirinya. Dengan preposisi semacam ini, orang akan paham akan apa yang terjadi di kalangan Perti setelah berkiprah di dunia politik. Garapannya yang bercabang dua, pendidikan keagamaan dan politik kenegaraan, adalah lahan yang jelas menuntut dinamisasi dan penalaran intelektual dengan segala macam sistemnya. Artinya, para tokoh perti yang memiliki kemampuan intelektual, punya dua wadah fundamental garapan penalarannya. Hanya, karena telah mengambil kata sepakat untuk tidak membicarakannya nilai-nilai keagamaan ibadah dan akidah yang sudah menjadi amalan orang banyak. Mereka menjadi segan menggarap lahan itu. Lalu, sebagai manusia, dan apalagi sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi nalar itu teralirkan ke potensi kedua, dunia politik dengan segala macam tipu dayanya. Gejala semacam inilah akhirnya yang mewarnai kehidupan Perti, dan ini pulalah kemudian yang menimbulkan trauma organisasi internal mereka. Beberapa orang tokoh muda yang berambisi di dunia politik tersebut terpengaruh di kalangan partai. Sirajuddin Abbas dan Rusli A. Wahid, sejak pertengahan tahun 1950-an secara bergantian menduduki posisi teras pimpinan Partai. Begitupun pada tahun 1968, muncul pula dua orang tokoh lain yang masing-masing menyatakan diri sebagai pemegang pimpinan Perti. Kedua orang itu adalah Rusli A. Halil dan T.S Mardjohan.<sup>93</sup>

Munculnya dua tokoh yang disebut terakhir ini dan menyatakan diri sebagai pemegang kekuatan Perti adalah bukti betapa organisasi ini telah di ombang-ambing oleh badai besar yang telah membawa trauma panjang di tubuh organisasi Kaum tradisi ini. Dua tokoh sentral ketika itu, Sirajuddin dan Rusli, saling berebut pengaruh, dan bahkan, konon saling melancarkan “fitnah”. Sirajuddin disebut-sebut condong ke “kiri”, sementara Rusli dianggap tukang fitnah yang berambisi untuk menggeser kedudukan Sirajuddin. Gontok-gontokan tidak akan dielakkan dan mencapai titik Kulminasinya dengan pemecatan Rusli

---

<sup>93</sup> Baharuddin ArRasuli, *Ayah Kita*, tahun 1978, p. 21.

A. Wahid sebagai ketua DPP dalam Muktamar IX pada tanggal 13-20 Januari 1962 di Jakarta. Jabatan itu di ambil alih oleh Sirajuddin sendiri. Pemecatan terhadap dirinya, ternyata tidak membuat Rusli mundur dari gerakan politik. Ia bahkan membuat DPP tandingan yang di ketuainya sendiri. Sementara itu, ia pun diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Anggota DPA mewakili Partai Islam Perti. Bersamaan dengan situasi politik akibat pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 maka terjadilah pergeseran-pergeseran struktual organisasi di tubuh Perti. Sirajuddin Abbas yang sebelumnya diisukan condong, atau “dekat” dengan orang-orang “kiri” , tidak mampu lagi mempertahankannya kedudukannya sebagai ketua DPP. Bersama Tengku Nyak Diwan, Sekretaris Umum Partai, ia diamankan oleh pihak militer. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berposisi oleh Sirajuddin Abbas untuk menduduki kursi kepemimpinan Partai yang kosong. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Abdurrahman, wakil ketua partai memanfaatkan kesempatan itu untuk menduduki tadi. Segera setelah itu ia pun mengumumkan pemecatan tiga orang DPP: Sirajuddin Abbas, Tengku Nyak Diwan, dan Sofyan Siraj (Putra Sirajuddin Abbas yang duduk sebagai Ketua Dewan Politik DPP Perti). Pada bulan Februari 1966, Perti mengadakan Musyawarah kerja di Bukittinggi. Sesuai dengan alam Orde Baru, organisasi ini menyusun pengurus DPP baru, dengan Rusli Halil sebagai ketua di bantu oleh T.S. Mardjohan dan Abdurrahman sebagai wakil ketua. Sedangkan Rusli A. Wahid terpilih sebagai Rais Am Majelis Syura, sebuah lembaga yang baru untuk pertama kalinya ada di organisasi Perti. Pemebntukan pengurus baru yang bukan melalui lembaga formal menurut Anggaran Dasar partai ini, dipandang oleh sebagai anggota Perti sebagai tidak representatif. Musyawarah itu hanya dihadiri oleh bebrapa cabang di Sumatera dan Jawa. Dan penyelenggaraannya pun hanya untuk mengisi kekosongan pengurus, akibat tindakan “pengamanan” yang dilakukan oleh pihak militer sebagaimana yang disebut diatas. Oleh karenanya, keputusan itu hanya untuk kepentingan sesaat, bukan permanen. Sementara itu, di lain pihak beberapa kalangan

interen Perti juga melihat bahwa unsure kepengurusan tersebut tidak bersih dari pengaruh “kiri”. Pihak yang tidak senang kepada Sirajuddin Abbas merasa senang dengan hasil Musyawarah. Mereka masih melihat adanya orang-orang Sirajuddin abbas yang duduk dalam kepengurusan baru itu. Untuk itu, timbul tuntutan Partai agar segera menyelenggarakan Muktamar sebagai langkah pembersihan. Usul ini ternyata disambut baik oleh pengurus-pengurus daerah, baik yang hadir dalam musyawarah maupun tidak.<sup>94</sup>

Begitulah, dengan tema “Konsolidasi” untuk membangun Partai, Perti menyelenggarakan Muktamar yang ke sepuluh pada tanggal 27 Agustus 1966 sampai dengan September 1966 di Jakarta. Sebagaimana halnya di Musyawarah kerja Bukittinggi, dalam muktamar ini tetap muncul tiga nama yang berebut untuk duduk di puncak Partai, ketiga nama itu adalah: Rusli A. Wahid, Rusli Halil, dan T.S. Mardjohan. Namun melalui perundingan yang agak sulit, muktamar kembali mengukuhkan Rusli Halil sebagai ketua DPP, dan Ahmad HMS sebagai Sekretaris Jendral. Sedangkan Rusli A. Wahid tetap sebagai Rais Am Majelis Syura. Dengan kedudukannya nama yang disebut terakhir dalam Majelis syura, di harap ia tidak akan campur tangan lebih jauh terhadap tugas-tugas DPP partai, dan dengan itu juga kemungkinan bentrok dengan kubu Sirajuddin Abbas dapat dihindari. Namun amat disayangkan, sebelum delegasi meninggalkan Jakarta, T.S. Mardjohan (kubu Sirajuddin Abbas) mengumumkan tandingan versinya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai ketua DPP Persatuan tarbiyah Islamiyah, dan Sirajuddin Abbas sebagai Rais Am Majelis Syura. Pengurus DPP versi T.S. Mardjohan ini jelas tidak di dukung oleh pemimpin-pemimpin daerah. Tindakan itu dianggap inkonstitusional dan dibentuk sepihak diluar Muktamar.<sup>95</sup>

Sedangkan pembicaraan dengan Sujono Humardani membuahkan hasil, membentuk pengurus baru minus orang-orang yang dianggap berasal dari kubu sirajuddin Abbas, seperti Ahmad HMS dan Baharuddin ARasuli, yang dalam muktamar terpilih sebagai sekretaris dan

---

<sup>94</sup> Baharuddin ArRasuli, *Ayah Kita...*, p.21.

<sup>95</sup> *Bulletin Sinar Tarbiyah*, Nomor 8, tahun 1980

wakil ketua. Yang pertama digantikan oleh Yudo Paripurno yang dalam Mukhtar dipilih sebagai wakil sekretaris, sedangkan yang kedua digantikan oleh yang lain pula. Kenyataan-kenyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, terutama di kalangan para pendiri yang masih hidup pada waktu itu. Atas nama pendiri, syekh Sulaiman ar-Rasuli menyatakan bahwa tindakan mengubah hasil mukhtar tersebut adalah inkonstitusional. Oleh karenanya, ia mengirim surat kepada Rusli A. Wahid dan Rusli Halil yang isinya meminta agar mereka kembali ke hasil Mukhtar. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari suratnya itu, pada tanggal 1 Maret 1969, Syekh Sulaiman ar-Rasuli mengeluarkan dekrit yang menghimbau agar Perti menanggalkan statusnya sebagai partai Politik dan kembali ke Khittah semula, sebagai organisasi sosial dan keagamaan. Syekh Sulaiman ar-Rasuli melihat kiprah perti di dunia Politik lebih banyak melahirkan konflik sehingga tugas utamanya meninggikan Syiar agama dan membina pendidikan menjadi terbengkalai. Serua seperti itu ternyata tidak seratus persen diterima oleh para pengikut yang sudah terlanjur lama bergelimang di kancah kehidupan politik. Kondisi beliau yang sudah tua (90 tahun), dan ditambah lagi seruan itu hanya berupa seruan tertulis, maka ada disamping ada yang menyambutnya dengan baik, ada pula yang menanggapinya dengan rasa curiga. Artinya, keabsahan surat itu telah menimbulkan suasana kontroversial dikalangan Perti. Sikap saling curiga, ternyata telah termasuk diantara mereka yang memang telah berbeda keinginan dari awal. Akibatnya, dekrit itu sendiri pun tidak mampu meredakan prgolakan. Perpecahan antara kedua kubu telah begitu sulit untuk dipersatukan kembali.<sup>96</sup>

Melihat suasana yang semakin sulit untuk dipersatukan, sebuah delegasi atas nama Syekh Sulaiman ar-Rasuli di bawah pimpinan Hamidin Sa'ad segera berangkat ke Jakarta, dengan tugas utama mengupayakan rujuk di kalangan parah tokoh yang sedang tidak rukun itu. Hanya amat di sayangkan, usaha ini tidak membawa hasil. Gagasan pendiri untuk benar-

---

<sup>96</sup> *Bulletin Sinar Tarbiyah*, Nomor 8....,

benar kembali ke status semula kurang mendapat respons. Kecurigaan akan keotentikan dekrit Syekh Sulaiman ar-Rasuli, membuat kubu Rusli A. Wahid enggan menerima tawaran rujuk yang di bawa oleh Hamidin tersebut. Demikianlah, gagal melaksanakan misinya, atas dasar pertimbangan dari beberapa orang (kubu Sirajuddin Abbas) yang tersingkir dari pengurus DPP, delegasi melakukan terobosan lain. Mereka melakukan pendekatan dan meminta bantuan kepada Golongan Karya untuk merehabilitasi status mereka yang tidak sehaluan dengan pengurus DPP susunan bersama Sujono Humardani. Demikianlah tangan terbuka, delegasi diterima oleh Jendral Sukowati, Ketua Golongan Karya Pusat pada saat itu. Dan, dengan legalitas yang dimiliki oleh Baharuddin dan HMS yang terpilih masing-masing sebagai wakil ketua dan Sekretaris dalam Muktamar sebelumnya, Sukowati menganjurkan agar mereka mendirikan Perwakilan Tarbiyah nonpolitik di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Usulan ini diterima, dan untuk melegitimasi usahanya digunakanlah dekrit Syekh Sulaiman ar-Rasuli tersebut. Pihak inilah yang mengadakan musyawarah besar luar biasa telah pada tanggal 2-4 Juli 1970 di Bukittinggi. Musyawarah ini mendapat dukungan sepenuhnya daripada pimpinan daerah Sumatera Barat, seperti Drs. Harun Zein (Gubernur) brigjen Sumatroro (Pangdam 17 Agustus) Brigjen Adam Samsul Bahri (Kapolda), Letkol Safruddin Bahar (ketua DPD Golkar), dan Letkol . Nazir Asmara (Korem Wirabraja, Agam, Bukittinggi). Mubes ini hadir oleh Jendral Sukowati, dan bahkan beliaulah “Bintang” Mubes ketika itu. Di antara keputusan musyawarah yang terpenting adalah:<sup>97</sup>

1. Mengukuhkan dekrit Syekh Sulaiman ar-Rasuli dengan menjadikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi nonpolitik, dan sebutan nama organisasi adalah “Tarbiyah” bukan Perti.
2. Membentuk Pengurus Besar (PB), sebagai ganti DPP dari Perti yang lama.

---

<sup>97</sup> Baharuddin ArRasuli, *Sejarah Lengkap Persatuan Tarbiyah Islamiyah*, (tahun 1979), p. 36-37.



3. Menggunakan kembali lambing Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang lama, yaitu Matahari bersinar ke delapan penjuru mata angin dengan bulan bintang tengahnya.
4. Menetapkan kedudukan PB di Bukittinggi, dan di Jakarta di bentuk perwakilan Pusat.
5. Menyatakan bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah bergabung dan berkerja sama dengan Golkar untuk kemenangan Orde Baru dalam Pemilu 1971.
6. Menetapkan susunan Pengurus Besar sebagai berikut:

Ketua Umum : K.H. Baharuddin ARasuli

Wkl. Ketua Umum: H. Ma'ana Hasnuty Dt. Tan Pahlawan MA.

Ketua I : K.H. Khalidi Said.

Sekretaris Jendral: Harmaini Said St. Sati.

Bendahara : Ummi H. Syamsiah Abbas.<sup>98</sup>

Sedangkan H. Ahmad HMS di tunjuk sebagai ketua perwakilan Pusat di Jakarta.

Susunan pengurus hasil Mubes di atas memberi gambaran bahwa personel kepengurusan itu seluruhnya berasal dari kubu Sirajuddin Abbas, dan sama sekali tidak terlihat wajah yang dating dari kubu Rusli. Hal ini wajar saja, karena kelompok yang disebut terakhir meragukan keabsahan dekrit, dan bahkan mencurigai kalau-kalau dekrit itu hanya taktik pihak pertama untuk menguasai kembali organisasi Perti. Oleh karenanya, kelompok Rusli tetap bertahan dengan status kepengurusan mereka sebelumnya, dan tetap berstatus sebagai Partai Politik.<sup>99</sup>

Pernyataan Sirajuddin Abbas untuk bergabung dengan Golkar, dan ketidaksediaan kelompok Rusli untuk melebur diri dari status politik tersebut, bisa disebut sebagai titik kulminasi kemelut Rumah Tangga Perti yang telah bergabung sekian lama. Bahkan, hasil Mubes itu pun, agaknya dapat dilihat sebagai "Surat Cerai" mereka yang sampai hari ini belum pernah ada rujukannya. Yang satu berjalan menurut keinginannya sebagai partai politik, dan tetap memakai nama P.I. Perti , sementara yang satunya lagi melebur diri

---

<sup>98</sup> Baharuddin ArRasuli, *Sejarah Lengkap Persatuan Tarbiyah Islamiyah...*, p. 36-37.

<sup>99</sup> Keputusan Munas Tarbiyah (Golkar), tahun 1984 tentang Ketarbiyahan, p. 16.

kedalam Golkar, dan memakai nama “Tarbiyah” saja. Hal inilah yang kemudiannya membuat masing-masing pihak merebut pengaruh untuk merangkul “anak-anak” dalam pemilu 1971. Suatu hal lain yang sangat diperhatikan oleh banyak anggota Persatuan Tarbiyah Islamiyah decade 1980-an adalah kenyataan bahwa betapa para tokoh mereka di keduai belah pihak belum benar-benar kembali ke khittah semula sebagaimana telah dihimbau oleh para pendiri.

Memang, himbauan itu sering didengungkan di hampir setiap pertemuan, namun belum wujudnya dalam praktik keorganisasian mereka sehari-hari. Kedua belah pihak masih sibuk di gelanggang politiknya masing-masing. Lembaga pendidikan yang untuk mengurus itulah sebenarnya Perti dilahirkan sering luput dari kepedulian organisasi, sehingga mereka terpaksa berjalan dan mengurus sendiri. Tidak hanya itu, kepedulian terhadap masalah-masalah keagamaan yang terlihat semakin banyak muncul dalam era pembangunan, sangat kurang. Bila tidak dapat dikatakan tidak terlihat lagi.<sup>100</sup>

Ironis memang, tapi begitulah keadaanya. Banyak sekolah yang dulu berlabel “Tarbiyah”, kini berubah menjadi nama-nama lain, seperti Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta, bahkan tidak sedikit menjadi sekolah umum. Hal ini antara lain terlihat di daerah lubuk Jambi (Riau) dan Painan (Sumatera Barat). Memang, Munas IV Tarbiyah Bukittinggi mislanya, membuktikan betapa organisasi ini secara fisik masih punya banyak anggota.

---

<sup>100</sup> Keputusan Munas Tarbiyah (Golkar)..., p. 16.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Syekh Sulaiman ar-Rasuli al-Minangkabawi, lahir di Candaung, sekitar 10 km. sebelah timur Bukittinggi, Sumatra Barat, 1287 H./1871 M, wafat pada 29 Jumadil Awal 1390 H./1 Agustus 1970 M. Ia adalah seorang tokoh ulama dari golongan Kaum Tua yang gigih mempertahankan madzhab Syafi'i. Tak jarang pula, Beliau dipanggil dengan sebutan "Inyik Candung". Ayahnya, Angku Mudo Muhammad Rasul, adalah seorang ulama yang disegani di kampung halamannya. Syekh Sulaiman ar-Rasuli, yang lebih dikenal oleh para muridnya dengan nama Maulana Syekh Sulaiman, sejak kecil memperoleh pendidikan awal, terutama dalam bidang pelajaran agama, dari ayahnya. Sebelum meneruskan studinya ke Mekah, Syekh Sulaiman ar-Rasuli pernah belajar kepada Syekh Yahya al-Khalidi Magak, Bukittinggi, Sumatera Barat.
2. Terbentuknya organisasi Perti adalah sebagai penegasan sikap yang berbeda dengan pergerakan Kaum Pembaru di Minangkabau dan tidak memihak Kepada Kaum yang mencampuradukan ajaran Islam dengan Khurafat, bid'ah, dan takhayul. Dengan demikian Perti jelas mengambil sikap berpaham Syafi'iyah yang tidak berhaluan keras.
3. Organisasi Perti memberikan perubahan pendidikan dari sistem surau menjadi kelas dan memberikan kemampuan terhadap siswanya membaca kitab-kitab kuning. Alumninya banyak yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi politik dan ada yang mendirikan sekolah-sekolah madrasah dan memberikan bimbingan dan pembinaan rohani, terutama bagi orang-orang dewasa seperti

mengadakan majelis taklim dan suluk, bekerja sama dengan para sufi, tareqat, dan alim ulama, terutama yang ada di pedesaan.

## **B. Saran-saran**

Demikianlah hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya kita menghargai dan menghormati serta mengapresiasi para pelaku sejarah. Terutama perjuangan Ulama yang nyaris terlupakan, kita juga hendaknya melihat dan mengambil pelajaran tentang bagaimana mereka dalam menghadapi kerasnya hidup masa itu.
2. Bagi sejarawan-sejarawan hendaknya terus mengembangkan inovasi dalam penelitian bidang sejarah nasional khususnya terkait dengan sejarah Syekh Sulaiman ar-Rusuli yang kurang diperhatikan dari banyak kalangan. Karena hal ini kurang diketahui oleh halayak banyak maka kita sebagai generasi penerus bangsa semestinya mengetahui sejarah-sejarah perjuangan tokoh lokal yang belum banyak yang diketahui perjuangannya.
3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya berkerja sama memperhatikan sector internal maupun eksternal yang ada disekitar Minangkabau. Sejarah perjuangan Syekh Sulaiman ar-Rusuli merupakan napak tilas perjuangan Kemerdekaan yang patut kita jaga dan dilestarikan.